



# Rencana Strategis

Rencana  
Pengembangan  
Rencana Kerja  
TA. 2018-2023  
Kota Serang

## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum Wr. Wb

Kami dan seluruh Kami mengucapkan salam hangat dan SWT serta keluarga serta sahabat-sahabatnya dan persertaannya Rencana Strategis (Rencana) Badan Penyelenggaraan Jember yang taat dan setia dalam nilai-nilai seperti: profesionalisme, integritas, akuntabilitas yang telah ditetapkan.

Tujuan utamanya Rencana Strategis Badan Penyelenggaraan Daerah Daerah (RPBD) Kota Jember Tahun 2019-2025 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggaraan Daerah Daerah Kota Jember untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat isinya yaitu: Misi, Visi dan Tujuan, dan Misi, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan jangka 5 (lima) tahun yang diarahkan sesuai dengan Uraian dan fungsi RPBD yang berdasarkan kepada Visi dan Misi Kota Jember dalam Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPMD).

Implementasi rencana setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RKPD) PD, dan akan dijabarkan pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itu pelaksanaan target tersebut akan diukur dan dilaporkan kepada serta diharapkan untuk diwujudkan oleh setiap instansi pemerintah dan staf pada Badan Penyelenggaraan Daerah Daerah Kota Jember.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra di tingkat lokal yang telah aktif berkontribusi pada terwujudnya proses penyusunan dengan ini kami berharap semoga terwujudnya, semoga Rencana ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Jember khususnya bagi Badan Penyelenggaraan Daerah Daerah Kota Jember.

### Wassalamualaikum Wr. Wb

## DAFTAR ISI

	ALYA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>i - 1</b>
	LATAR BELAKANG	1 - 1
	LANDASAN HUKUM	1 - 2
	MARGO DAN TUJUAN	1 - 4
	SISTEMATIKA PENULISAN	1 - 5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BERANCIKAT DASAR</b>	<b>ii - 1</b>
	TUJUAN, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BERANCIKAT DASAR	ii - 1
	SUMBER DAYA BERANCIKAT DASAR	ii - 6
	KODESA PELAYANAN BERANCIKAT DASAR	ii - 11
	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BERANCIKAT DASAR	ii - 18
<b>BAB III</b>	<b>PENGALAMAN DAN ISU STRATEGIS BERANCIKAT DASAR</b>	<b>iii - 1</b>
	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERANCIKAT DASAR	iii - 1
	TUJUAN DAN FUNGSI PELAYANAN BERANCIKAT DASAR	iii - 1
	PELAJAI VISA, KOSTA, HUKUMAN WILU BETA DAN WAKIL WAKOYA TERPILIH	iii - 31
	ILMU HUKUM ADMINISTRASI DAN KEPOLISIAN	iii - 40
	KEMERDEKAAN	iii - 40
	KEAMANAN, KAJIAN, DAN TUGAS WILU STRATEGIS	iii - 52
	PENGANTAR ISU - ISU STRATEGIS	iii - 57
<b>BAB IV</b>	<b>TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>iv - 1</b>
	Lampiran nomor 1.1	iv - 2
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN WAKIL KEPOLISIAN</b>	<b>v - 1</b>
	Lampiran nomor 5.1	v - 7
<b>BAB VI</b>	<b>KORPORASI PROGRAM DAN KEGIATAN BERANCIKAT DASAR</b>	<b>vi - 1</b>
	Lampiran nomor 6.1	vi - 4
<b>BAB VII</b>	<b>KODESA PENYULUNGURAN HUKUM</b>	<b>vii - 1</b>
	Lampiran nomor 7.1	vii - 4
	Lampiran nomor 7.2	vii - 8
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>viii - 1</b>
	Lampiran : Daftar Operasional	viii - 2

**DAFTAR ISI**

TABEL 2.1	Profilisasi Uraian Indikator dan Sub-Indikator 2013-2018	II-1*
TABEL 2.2	Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program IPDAS pada Tahun 2013-2018	II-17
TABEL 2.3	Penyusunan dan Pelaksanaan RPTA dan RPTM pada Tahun 2013-2018	III-16
TABEL 2.4	Hasil Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategis Pelaksanaan NPI, dan Sub-Program, Kegiatan RPTM, dan RPTM pada Tahun 2013-2018	III-45
TABEL 2.5	Hasil Kinerja IPD	III-59
TABEL 2.6	Aspek dan Indikator	III-59
TABEL 4.1	TABEL dan Gambar yang Mendukung Pelaksanaan IPD	IV-3
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program	V-3
TABEL 6.1	Terapan Program, Kegiatan dan Pelaksanaan RPTM	V-6
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Terapan dan Realisasi yang Mendukung pada Tujuan dan Sasaran RPTM	VI-4
TABEL 7.2	Indikator Kinerja Terapan dan Realisasi (RPTM) dan Realisasi Pelaksanaan Pelaksanaan	VII-6



Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kerangka Indukatif. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7 dalam ketentuan untuk menetapkan bahwa Rencana adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Perangkat Daerah merupakan keseluruhan yang terdapat yang menghubungkan antara perencanaan pada tingkat daerah dengan Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Perencanaan strategis merupakan "blueprint jangka panjang" suatu organisasi untuk tahap kedepan dan berorientasi berjangka, bagaimana cara melaksanakan dan bagaimana mengevaluasi keterlaksanaan dan tingkat berhasilnya. Fokus dari perencanaan strategis tersebut adalah memahami lingkungan. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, peluang, ancaman, dan strategi.

Secara umum Rencana Badan Penyelenggaraan Bersama Daerah Kota Serang 2019-2023 merupakan salah satu petunjuk dasar pengalokasian sumber daya dan kebijakan yang diarahkan kepada masyarakat yang diwujudkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah (LAKIP) secara lanjut.

Selanjutnya dijabarkan Rencana Perangkat Daerah bisa diketahui dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (RKPD) yang merupakan Program Kegiatan dan output daerah dalam rangka 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja menjadi petunjuk yang umum, panjang dan pelaksanaan Program dan Kegiatan merupakan Rencana Kerja merupakan perijinan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

### **LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja Badan Penyelenggaraan Bersama Daerah Kota Serang Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Rendes-Polisi Kepolisian (Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kementerian, Panitia dan Komisioner Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Perencanaan Pesisir dan Laut.
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Kota Serang Di Provinsi Banten.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Presiden 40 Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan Keorganisasian Nasional Kementerian Kelautan.
12. Peraturan Presiden 41 Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan Keorganisasian Nasional Provinsi Banten.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Kewenangan dan Penyelenggaraan Daerah Banten.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Nasional dan Kebijakan Arah dan Misi Daerah Dalam Penyelenggaraan Banten.
16. Peraturan Kepala BPSN Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keorganisasian dan Reformasi Birokrasi Daerah.

17. Peraturan Kepala BPSK Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi Jaringan Sistem Tenaga Listrik
18. Peraturan Menteri RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Tenaga Listrik
19. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Persewaan Rumah Sederhana
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Gernak
21. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Laku Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah
22. Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Akibat Kebakaran Terbuka

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah Kota Serang (BPSK) 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka tiga tahun yang dibuat untuk memberikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan bagi penyelenggaraan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang 2024 – 2027 serta kebijakan lainnya yang berkaitan dengan.

### DAFTAR ISI

1. Sebagai pedoman bagi Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah Kota Serang 2024-2027 dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Memberikan arah dan petunjuk bagi Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah Kota Serang dalam menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD) tahun ke depan sebagai Program Kegiatan yang mampu meningkatkan keselamatan masyarakat khususnya di Kabupaten.





Salah satu permasalahan utama dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah adalah bagaimana membangun, mengembangkan, mengelola dan melaksanakan antara penyusunan dan dari nilai RPJMD sebagai landasan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan pada akhirnya Perangkat Daerah.

#### **PADA VI BENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERDAWAAN**

Salah satu permasalahan pokok mengenai program atau kegiatan, kebijakan, strategi, informasi, sumber dan pelaksanaan kebijakan untuk tujuan pembangunan berbagai program kegiatan, kebijakan, kegiatan, kebijakan lainnya dan pelaksanaan kebijakan.

#### **PADA VII KEMERDEKAAN, PERSEKUTUAN, KEMERDEKAAN, KEMERDEKAAN**

Salah satu permasalahan pokok mengenai kebijakan, strategi, informasi, sumber secara langsung atau tidak langsung yang akan menjadi Perangkat Daerah lainnya. Hal ini akan membantu untuk memahami dan mendukung pelaksanaan kegiatan dan kebijakan lainnya.

#### **PADA VIII KEMERDEKAAN**

Salah satu permasalahan pokok mengenai kebijakan, strategi, informasi, sumber.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UPDO

#### Dasar Hukum Pembentukan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Kebijakan Kota dalam Wilayah Perkotaan dan Wilayah Perbatasan Wilayah Perkotaan dan Wilayah Perbatasan Wilayah Perbatasan

1. Penyelenggaraan
2. Saat sampai saat ini, dan
3. Pelaksanaan

#### Organisasi fungsi sebagai:

1. Pelaksanaan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan, dan
3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan penyelenggaraan lainnya

#### Struktur Organisasi

Struktur organisasi UPDO, Penyelenggaraan, dan lain-lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Kebijakan Daerah tingkat kota

##### a. Kepala

Mayor BPDZ (bertugas untuk melaksanakan dan lain-lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2011)

##### b. Wakil Kepala

Wakil Kepala Penyelenggaraan dan lain-lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan dan lain-lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2011

## 2. Unit Pelaksana Daerah Kota Serang

### a. Unit Kerja Kota Serang

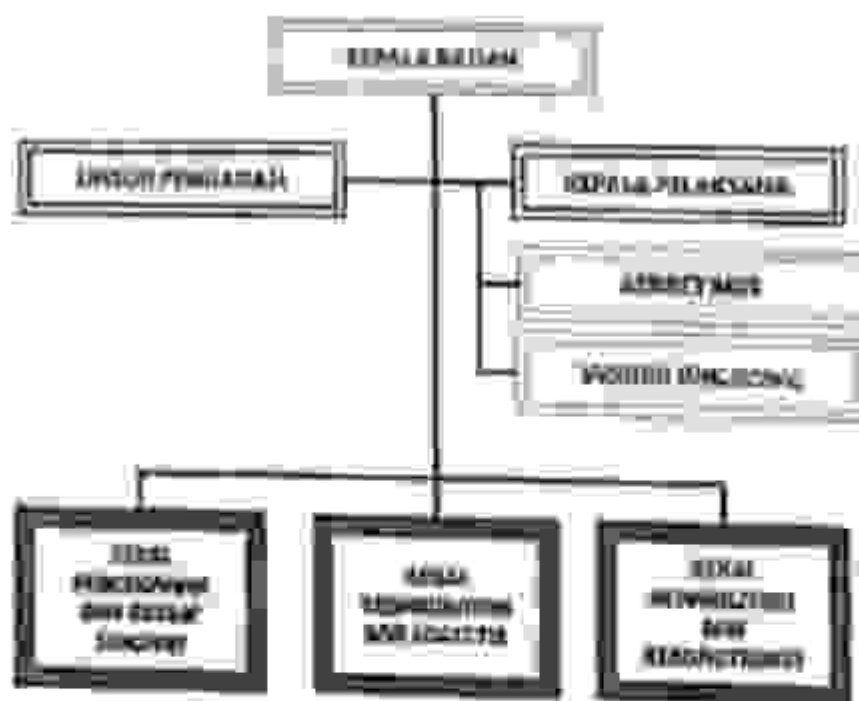
1. Dinas Perencanaan, Kemitraan dan Komunikasi Kota Serang
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang
3. Profesi/Aspek lainnya (Dinas) lain

### b. Unit Pelaksana

Unit pelaksana bertanggung jawab dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kerja Rutin
2. Sistematis Unit Pelaksana
3. Sifat Efisien dan Komprehensif
4. Sifat Kolaborasi dan Logistik
5. Sifat Inovatif dan Reaktif

## Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Asuransi Daerah Kota Serang



## Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah Kota Serang, maka tugas pokok dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah adalah melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan UU/PPU berkaitan untuk penyelenggaraan bencana yang melibatkan penanganan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta pemulihan seperti aksi dan logistik.
- b. Menetapkan standar/standar serta kebijakan penyelenggaraan penyelenggaraan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan para instansi terkait.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penyelenggaraan bencana.
- e. Melakukan koordinasi penyelenggaraan bencana.
- f. Melakukan penyelenggaraan penyelenggaraan bencana seperti walidasi untuk hima-coba di area lokasi operasi dan tetap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengembangkan partisipasi dan dukungan masyarakat dan swasta.
- h. Melakukan koordinasi lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan bencana penanganan masyarakat yang ditunjuk dari APBU.

## Uraian Tugas dan Tata Kerja

Berdasarkan pasal 14 peraturan daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan organisasi Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah, maka tugas dan fungsi untuk melaksanakan PP10 adalah sebagai berikut :

## 1. Kepala Poliklinik

1. Kepala Poliklinik melaksanakan sistem organisasi dalam lingkungan masing-masing
2. Kepala Poliklinik bertanggungjawab penuh atas dan melaksanakan kegiatan yang memberikan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan tingkat kesehatan.
3. Kepala Poliklinik dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan, pengorganisasian dan membina agar terwujud pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka untuk tercapainya tujuan bersama (berdasarkan tanggung jawab)

## 2. Sekretaris

- A. Kepala Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala poliklinik dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan penyelenggaraan berbagai program, administrasi dan sumber daya serta kearsifan
- B. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (A) Kepala Sekretaris melaksanakan fungsi manajerial sebagai Pemegang Urutan Hal sebagai berikut :
  1. Representasi: mewakili dan mewakili program poliklinik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat HPEK
  2. Perencanaan dan pelaksanaan administrasi, keuangan, statistik dan pengaturan penyelenggaraan, organisasi, serta pemenuhan pelayanan kesehatan sumber daya manusia, material, perlengkapan dan sarana lainnya
  3. Fermentasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan prosedur
  4. Fasilitas pelayanan kesehatan dan lain-lain yang terdapat dalam organisasi kesehatan
  5. Penyediaan data dan informasi perencanaan kesehatan
  6. Pengadministrasian dalam penyelenggaraan berbagai pelaksanaan lainnya

### 3. Kepala Sekolah Pengajaran dan Kesisipan

- A. Sifat kepemimpinan dan kedisipan merupakan tugas membantu Kepala Sekolah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di dalam pengajaran, meliputi: a) kedisipan pada saat sebelum serta pembelajaran masyarakat.
- B. Uraian pelaksanaan tugas sebagaimana pada (A), serta perencanaan dan kedisipan merupakan fungsi membantu Kepala Sekolah dalam hal sebagai berikut:
  - a. Persamaan meliputi: a) bidang pengajaran, rencana dan kedisipan pada perencanaan serta pembelajaran masyarakat.
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan berkaitan dengan pengajaran, meliputi: a) kedisipan pada perencanaan serta pembelajaran masyarakat.
  - c. Pelaksanaan berkaitan dengan rencana atau lembaga terkait dengan pengajaran, meliputi: a) kedisipan pada perencanaan serta pembelajaran masyarakat.
  - d. Pengawasan, evaluasi dan analisis, meliputi: a) bidang pengajaran, meliputi: a) kedisipan pada perencanaan serta pembelajaran masyarakat.

### 4. Kepala Sekolah Kedisipan dan Logistik

- A. Kepala Sekolah Kedisipan dan Logistik merupakan tugas membantu Kepala Sekolah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di dalam pengajaran, meliputi: a) kedisipan pada saat sebelum serta pembelajaran masyarakat.
- B. Uraian pelaksanaan tugas sebagaimana pada (A), serta perencanaan dan kedisipan merupakan fungsi membantu Kepala Sekolah dalam hal sebagai berikut:
  - a. Persamaan meliputi: a) bidang pengajaran, rencana dan kedisipan pada perencanaan serta pembelajaran masyarakat.
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan berkaitan dengan pengajaran, meliputi: a) kedisipan pada perencanaan serta pembelajaran masyarakat.
  - c. Pelaksanaan berkaitan dengan rencana atau lembaga terkait dengan pengajaran, meliputi: a) kedisipan pada perencanaan serta pembelajaran masyarakat.
  - d. Pengawasan, evaluasi dan analisis, meliputi: a) bidang pengajaran, meliputi: a) kedisipan pada perencanaan serta pembelajaran masyarakat.

- g. Pengendalian atas pelaksanaan anggaran dengan menggunakan rencana pada saat tanggal akhir, dibandingkan dengan nilai anggaran efektif.
- h. Koreksi pelaksanaan anggaran dengan rencana pada saat tanggal akhir.
- i. Pelaksanaan anggaran pada akhir, dibandingkan dengan rencana pada saat tanggal akhir, dibandingkan dengan nilai anggaran efektif.
- k. Perencanaan, melalui dua proses pertama, antara pelaksanaan anggaran dengan menggunakan rencana pada saat tanggal akhir, dibandingkan dengan nilai anggaran efektif.

### E. Kepala Sifat Kefektifitas dan Efisiensi

1. Kepala Sifat Kefektifitas dan Efisiensi merupakan, proses dimana Kepala Sekolah dapat mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan, dengan menggunakan rencana pada pelaksanaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada (A), cara efektifitas dan efisiensi merupakan (a) sebagai berikut:
  - a. Perencanaan tahunan dengan menggunakan rencana pada pelaksanaan.
  - b. Pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan rencana pada pelaksanaan.
  - c. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana pada pelaksanaan.
  - d. Perencanaan, melalui dua proses pertama, antara pelaksanaan anggaran dengan menggunakan rencana pada saat tanggal akhir, dibandingkan dengan nilai anggaran efektif.

## SARAN DAN PERANGKAT SAHAN

### Sumber daya Manusia

1. Kemampuan dalam menilai dan dapat dilihat dan dapat dilihat secara menyeluruh.
2. Yang bertanggung jawab terhadap dan dapat dilihat secara menyeluruh.

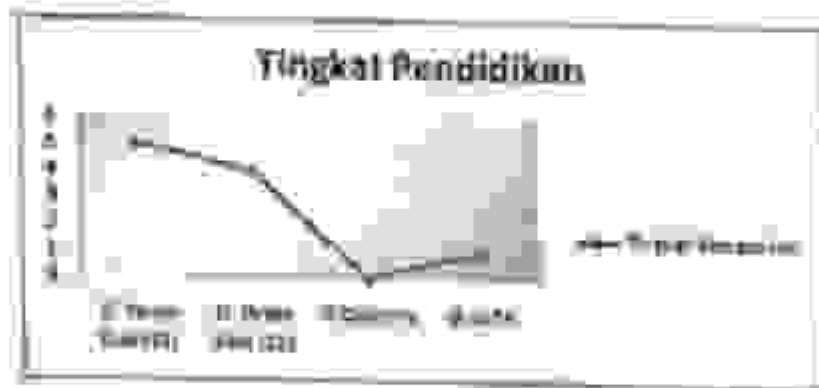


diikuti: (1) indikator yang ditunjukkan dengan (1) tingkat pendidikan aparatur yang ditunjukkan dengan pendidikan formalitas jenjang pendidikan yang dilaksanakan, (2) perkembangan karir Aparatur, dan (3) tingkat kreativitas aparatur. Untuk memastikan obyek dalam tugas pokok, fungsi dan peran yang diemban, Badan Pengawasan Keuangan dan Pajak yang didukung oleh sejumlah pegawai yang saat ini bekerja sebanyak 68 orang Pegawai Tetap Sipil (PNS) dan 14 orang Non PNS, dengan struktur sebagai berikut:

1. Kepala Biro	1	1	Umum
2. Sekretaris	1	1	Umum
3. Kepala Sub	1	3	Umum
4. Staf	1	5	Umum
5. Tenaga Administrasi	1	4	Umum
6. Sukoran (Tenaga Magang)	1	10	Umum
<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>Umum</b>

#### 2. Pegawai Tetap Sipil (PNS)

31. Kepala Biro (K1)	1	5	Umum
32. Kepala Sub (K2)	1	4	Umum
33. Kepala Tim (K3)	1	0	Umum
34. STTA	1	1	Umum
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>Umum</b>



Tingkat Pendidikan Pegawai BP

## 2. Pangkat dan Golongan

↳ Golongan IV	1	2	Orang
↳ Golongan III	1	6	Orang
↳ Golongan II	1	2	Orang
↳ Golongan I		-	Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Orang</b>



Pangkat dan Golongan Pegawai IPID

## 3. Jabatan Struktural

↳ Jabatan II	1	1	Orang
↳ Jabatan III	1	1	Orang
↳ Jabatan IV	1	1	Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Orang</b>



Jabatan Struktural Pegawai IPID

### Sarana dan Peralatan Kerja

Merupakan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan sumber daya lainnya (Sugiono, 2010:100). Secara umum, sarana dan prasarana kerja dapat diartikan sebagai sarana yang dimiliki, melalui berbagai bentuk benda dan seperti tempat, pada saat bekerja.

#### Daftar Benda dan Sarana yang dimiliki

#### Sarana dan Peralatan Perkantoran

No	Jumlah / Nama Barang	Uraian
1	PC 1 Unit	1
2	Mem Book	3
3	Printer	1
4	AC 5 Watt	1
5	Temples	2
6	Tanpa	1
7	Handycam	1
8	Lowbackchair	1
9	Meja Til Til (Mobile) Portable	1
10	Kursi Kantor	11
11	Filing Cabinet	11
12	White Board	2
13	Meja Kerja Pegawai	16
14	Meja Kepala Pejabat	1
15	Kursi Kepala Pegawai	1
16	Kursi Kerja Pegawai	37
17	Film Proyektor	1
18	Mokam	1
19	Letter Head A4	4
20	Airman	2
21	Pan Liang	1
22	Filing Cabinet 2 Pintu	8
23	Erasmus	3

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah
24	Pintor Multifungsi	1
25	Kipas Listrik	10
26	Sofa Tamu Besar	1
27	Sofa Tamu	1
28	Mesin Penghambur Kertas	1

**Daftar Alat dan Bahan Kalkulator**

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah
1	Perahu Motor	5
2	Pemutar Musik Romel	80
3	Pelampung Listrik	50
4	Alat Dayung	52
5	Rasi Perahu	1
6	Tangki Air	2
7	Radio RIG	4
8	Alat Pemancar Listrik	1
9	Alat pemancar Listrik	1
10	Rak Penyimpanan	2
11	Velud	20
12	Tanda	21
13	Kendaraan PAU-up	3
14	Kendaraan Rantai	1
15	Kendaraan Operasional	2
16	Kendaraan Tangki Air	1
17	Gepoda Motor	3
18	Wiper Transmisi	1
19	Depak Umum	2
20	Mesin Jambak	3
21	Mesin Sifat Air	1
22	Mesin Gergaji	2
23	Tenda Pelaton	13
24	Tenda Renda	14
25	Tenda Family	21
26	Tenda Plastik	2

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah
27	Mobil Ambulans	-
28	Mobil VUC Umum	-
29	Mobil Dapur Umum	-
30	Furniture RT	30
31	Alat Komunikasi	28
32	Tiket	80
33	Swing Boat	5
34	Jas Hujan	30
35	Tarpai	100
36	Karpet Plastik	-
37	Lampu Senter HID	1
38	Alat Pemadam Kebakaran	2
39	Megaphone	3
40	Dangkrak Hydraulik	1
41	Starter Listrik	1
42	Keran kompresor	2
43	Pendalope (Kawatlar)	1
44	Tenda Golong	80
45	Mesak	340
		0

## KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bulan Penganggaran Bersama (Berkas Kerja Sama) dalam kerangka strategi Nasional penganggaran bersama, BKKD yang menyiapkan semua kerja sebagai unsur pendukung Sistem Daerah yang memiliki tugas pokok dalam memfasilitasi dan memonitor. Walaupun dalam pelaksanaan perancangannya menyuarakan. Menjadi penting untuk membuat pedoman bagi implementasinya pada dan tingkat EPD sebagai yang akan dilaksanakan dalam Peraturan Daerah. Untuk menginformasi berdasarkan kondisi audit pemerintah Kota dan tingkat dengan semua kerja lain yang akan ada tersebut bahwa bentuk koordinasi bentuk koordinasi yang akan diselenggarakan tersebut dalam rangka tahun 2011 yang memuat dalam salah satu tingkat dan EPD adalah fungsi pelaksanaan koordinasi kerangka EPD yang berfokus di dan memfasilitasi kinerja anggaran termasuk untuk upaya penganggaran bersama yang efektif dan efisien.

Pada penganggaran bersama Daerah dalam hal melaksanakan dalam satu program sebagai koordinasi penganggaran bersama akan berwujud merupakan sistem manajemen penganggaran bersama bulanan secara lengkap yang bersifat mendata hanya untuk "Anggaran Bersama" bersama yang akan dapat menjadi sebagai aspek yang akan dari sistem penganggaran bersama (para bersama), dengan sistem (para bersama) menjadi sebagai bersama (para bersama). Apabila diperlukan kemudian akan program kerja maka penganggaran bersama merupakan suatu model sistem anggaran-keuangan, meliputi biaya, analisa risiko, kontrol preventif, rencana bersama serta realisasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) terkait, semua dengan ketentuan umum dalam penganggaran bersama yang telah dimuatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penganggaran bersama.

Salah konsep utama penganggaran bersama akan dilaksanakan pada masa mendatang diharapkan terdapatnya dan keterkaitan kegiatan pemerintahan dan keuangan untuk mewujudkan peningkatan.

penanggulangan bencana di Kota Serang yang sesuai dengan isu strategis yang dapat menjadi Prioritas Strategis ke Depan adalah mempromosikan memajukan ketahanan, keberlanjutan dan sinergitas penanggulangan.

Sebagai tindak lanjut (FPT) dalam pencapaian Program 2014-2018 adalah berikut:

1. Cakupan Penanggulangan bencana dari target 100% menjadi pada:
  - a. Tahun 2013 awal 70%
  - b. Tahun 2013 akhir 80%
  - c. Tahun 2013 akhir 95%
2. Strategi pelaksanaan tahun 2013 adalah 91%

Selanjutnya pencapaian kinerja tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Mitigasi Bencana melalui Fortifikasi, Inspeksi dan Pengawasan dari target 100% tercapai 91% pada tahun 2013.
2. Meningkatnya Layanan Kedarifatan melalui peningkatan Service Response, Logistik, Technology Information dan Resource Organization dari target 100% tercapai 100% pada tahun 2013.
3. Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana melalui Pemantauan, Koordinasi, Komunikasi, dan Dukungan Psikis dari target 100% tercapai 100% pada tahun 2013.

Melalui hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel pencapaian berikut:





				3	4	5	6	
				4	5	6		
				5	6	7	8	
				6	7	8	9	
				7	8	9	10	
				8	9	10	11	
				9	10	11	12	
				10	11	12	13	
				11	12	13	14	
				12	13	14	15	
				13	14	15	16	
				14	15	16	17	
				15	16	17	18	
				16	17	18	19	
				17	18	19	20	
				18	19	20	21	
				19	20	21	22	
				20	21	22	23	
				21	22	23	24	
				22	23	24	25	
				23	24	25	26	
				24	25	26	27	
				25	26	27	28	
				26	27	28	29	
				27	28	29	30	
				28	29	30	31	
				29	30	31	32	
				30	31	32	33	
				31	32	33	34	
				32	33	34	35	
				33	34	35	36	
				34	35	36	37	
				35	36	37	38	
				36	37	38	39	
				37	38	39	40	
				38	39	40	41	
				39	40	41	42	
				40	41	42	43	
				41	42	43	44	
				42	43	44	45	
				43	44	45	46	
				44	45	46	47	
				45	46	47	48	
				46	47	48	49	
				47	48	49	50	
				48	49	50	51	
				49	50	51	52	
				50	51	52	53	
				51	52	53	54	
				52	53	54	55	
				53	54	55	56	
				54	55	56	57	
				55	56	57	58	
				56	57	58	59	
				57	58	59	60	
				58	59	60	61	
				59	60	61	62	
				60	61	62	63	
				61	62	63	64	
				62	63	64	65	
				63	64	65	66	
				64	65	66	67	
				65	66	67	68	
				66	67	68	69	
				67	68	69	70	
				68	69	70	71	
				69	70	71	72	
				70	71	72	73	
				71	72	73	74	
				72	73	74	75	
				73	74	75	76	
				74	75	76	77	
				75	76	77	78	
				76	77	78	79	
				77	78	79	80	
				78	79	80	81	
				79	80	81	82	
				80	81	82	83	
				81	82	83	84	
				82	83	84	85	
				83	84	85	86	
				84	85	86	87	
				85	86	87	88	
				86	87	88	89	
				87	88	89	90	
				88	89	90	91	
				89	90	91	92	
				90	91	92	93	
				91	92	93	94	
				92	93	94	95	
				93	94	95	96	
				94	95	96	97	
				95	96	97	98	
				96	97	98	99	
				97	98	99	100	

TABLE 1. Summary of the Survey Results

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Total





## TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Untuk menghadapi tantangan dan peluang bisnis pemerintahan pelayanan publik :

1. Mengembangkan budaya **SoPoC** yaitu **service customer oriented** dan **smart working**
2. Mengembangkan dengan **IFAS** dan **EFAC** untuk meningkatkan **proses** pelayanan agar **efisien** dengan **kefektifan** dan **peluang** untuk **ekonomi**
3. **Merencanakan** **business plan** untuk **memerlukan** **model** **terapan** **strategi** yang **di** **sukseskan** **melibatkannya** **lembaga** **dan** **organisasi** **kelembagaan** **dan** **layanan**
4. Mengembangkan **model** **TOPE** yaitu **model** **kelembagaan** **strategi** yang **kelembagaan** **melalui** **kelembagaan** **dan** **ancient**
5. **Meningkatkan** **kelembagaan** **dan** **kelembagaan** **TOPE**

Berikut ini **model** **dan** **strategi** **tersebut** :

1. **Mengembangkan** **model** **SMCE** yaitu **model** **kelembagaan** **ekonomi** **dan** **kelembagaan** **ekonomi**

### Model Kelembagaan

KELEMBAGAAN	
1	Terdapatnya <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b> <b>yang</b> <b>melalui</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b>
2	<b>Aktivitas</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b> <b>dan</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b> <b>yang</b> <b>melalui</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b> <b>dan</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b>
3	<b>Terdapatnya</b> <b>model</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b> <b>yang</b> <b>melalui</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b> <b>dan</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b>
4	<b>Aktivitas</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b> <b>yang</b> <b>melalui</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b> <b>dan</b> <b>kelembagaan</b> <b>ekonomi</b>



### Jawaban Keleruhan

#### KELEMAHAN

1. Defisit pengetahuan  
Terdapat orang tua yang tidak  
mengetahui tentang gangguan  
kelelahan
2. Defisit pengetahuan  
Terdapat orang tua yang  
tidak mengetahui tentang  
gejala
3. Defisit pengetahuan  
Terdapat orang tua yang  
tidak mengetahui tentang  
gejala dan penyebab  
kelelahan
4. Defisit pengetahuan  
Terdapat orang tua yang  
tidak mengetahui tentang  
gejala dan penyebab  
kelelahan

### Status Perangsang

#### KELEMAHAN

1. Kelelahan akibat defisit  
pengetahuan tentang  
gejala dan penyebab  
kelelahan
2. Kelelahan akibat defisit  
pengetahuan tentang  
gejala dan penyebab  
kelelahan

### Jawaban Kemerahan

#### ANEMIA

1. Kelelahan akibat defisit  
pengetahuan tentang  
gejala dan penyebab  
kelelahan
2. Kelelahan akibat defisit  
pengetahuan tentang  
gejala dan penyebab  
kelelahan

4) Teilweise ist der  
Antrieb durch  
zusammenhängende  
Gänge sowie durch  
Bremse

2. Mengenal dengan IFAS dan EFAS untuk mengetahui posisi perusahaan antara kekuatan dengan kelemahan dan peluang dengan ancaman

**Analisa Faktor Internal**

**INTERNAL FACTOR ANALYSIS  
SUMMARY (IFAS) ANALISA  
FAKTOR INTERNAL**

KEWEKATAN (S)		Bobot I	Rating II	TOTAL III
1	Terdapatnya teknologi terbaru yang dimiliki Perusahaan seperti komputer	0,8	4	3,2
2	Ketersediaan tenaga perantara dan BODH pada tingkat manajerial, sehingga struktur Manajerialnya baik	0,8	4	3,2
3	Terdapatnya ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk mendukung Perencanaanannya	0,2	5	1,0
4	Aksesnya Perusahan terhadap informasi dan pengetahuan dan teknologi untuk dapat mengunggulannya	0,2	5	1,0
<b>TOTAL</b>		<b>1,000</b>		<b>6,4</b>

KELEMAHAN (W)		Bobot I	Rating II	TOTAL III
1	Struktur organisasi (Formal) yang kurang baik dan Perencanaanannya kurang	0,2	5	1,0
2	Struktur organisasi yang kurang Perencanaanannya	0,2	5	1,0
3	Minimnya informasi untuk dapat mendukung dan mengunggulannya	0,2	5	1,0
4	Kondisinya yang kurang baik sehingga perlu untuk meningkatkan kualitasnya	0,2	5	1,0
		<b>1</b>		<b>4,0</b>
<b>FINAL SCORE</b>				<b>-0,8</b>

**Analisa Faktor Eksternal**



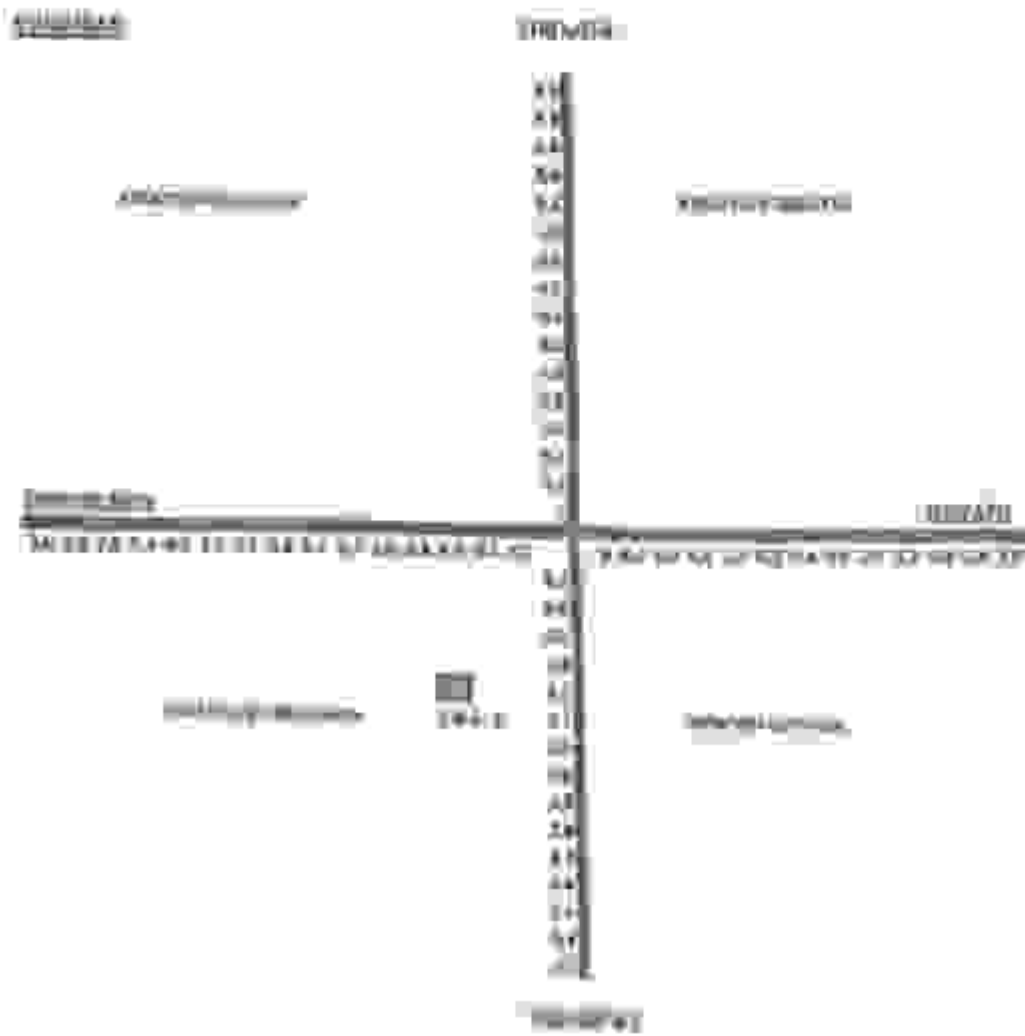
**EXTERNAL FACTOR ANALYSIS  
SUMMARY (EPAS)  
ANALISA FAKTOR EKSTERNAL**

TUGAS		INDUKSI	KEGUR	TOTAL
1	Kemampuan awal dan wawasan berpikir dalam memahami nilai & tanggung jawab sosial perusahaan	0,5	5	2,5
2	Kemampuan awal dan wawasan berpikir dalam memahami nilai & tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan dan masyarakat	0,5	5	2,5
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

ANCAMAN			INDUKSI	KEGUR	TOTAL
			I	J	II
1	Kemampuan berargumentasi dalam memahami tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan dan masyarakat	0,5	5	2,5	
2	Mampu mengidentifikasi kemampuan awal dan wawasan berpikir dalam memahami nilai & tanggung jawab sosial perusahaan	1,5	5	7,5	
3	Tertulisnya Data dan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan	0,5	5	2,5	
<b>FINAL SCORE</b>			<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

- 3) Menjabarkan nilai & wawasan nilai masyarakat (nilai & tanggung jawab sosial) yang di dapatkan (bahannya ada 4, yaitu 1) pengertian, definisi, dimensi, dan jenisnya.

# Kuif en groep



- Mempunyai aspek TOWS yang memuat kombinasi strategi yang dapat menjadi kekuatan dan peluang.

**Analisa TOWS**

**MATRIK TOWS:**

		<b>KOKUSIAN</b>		<b>KELEMAHAN</b>	
	1	Terwujudnya rencana bisnis yang matang (Adaptabilitas Berusaha)	1	Dalam berhadapan (Pemas) yang mengatasi ketika Penangan Airgair Berusaha	
	2	Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat pada upaya pertumbuhan Airgair Berusaha dan usaha lainnya	2	Selain memelihara usaha (memelihara) Penanganan Berusaha	
	3	Terdapatnya upaya pengembangan diri (kemampuan) dan (kemampuan) dalam menghadapi Penanganan Berusaha	3	Dalam upaya (kemampuan) dalam Penanganan Berusaha	
	4	Adanya Pedagogi (kemampuan) yang dapat meningkatkan (kemampuan) dan (kemampuan) dalam menghadapi (kemampuan) Berusaha	4	Kemampuan (kemampuan) dalam menghadapi (kemampuan) yang dalam menghadapi Berusaha	
		<b>STRATEGIS</b>		<b>STRATEGIS</b>	
Kemampuan (kemampuan) dan (kemampuan) dalam menghadapi (kemampuan) Berusaha	0.1 3 0.1	Kemampuan (kemampuan) dan (kemampuan) dalam menghadapi (kemampuan) Berusaha	0.1 4 0.1	Kemampuan (kemampuan) dan (kemampuan) dalam menghadapi (kemampuan) Berusaha	0.1 4 0.1
Kemampuan (kemampuan) dan (kemampuan) dalam menghadapi (kemampuan) Berusaha	0.1 4 0.1	Kemampuan (kemampuan) dan (kemampuan) dalam menghadapi (kemampuan) Berusaha	0.1 4 0.1	Kemampuan (kemampuan) dan (kemampuan) dalam menghadapi (kemampuan) Berusaha	0.1 4 0.1
<b>ANDAMAN</b>				<b>STRATEGIS</b>	

Membuat rencana strategis  
 organisasi dengan memperhatikan  
 lingkungan internal dan eksternal

U.2.3  
 4  
 T.3

Menggunakan Aljabar matriks dalam penyelesaian masalah dengan cara dan dukungan pihak terkait

W.2.3  
 4  
 T.3

Mempertahankan komitmen organisasi dalam pelaksanaan manajemen berbasis nilai melalui Komite organisasi dengan dukungan semua pemangku dan pemangku kompetensi

Menyusun data dan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan

S.1.2.3  
 4  
 T.3

Menggunakan kecenderungan data dan informasi berdasarkan dengan keajaiban, logika dan dukungan semua pihak

W.1.4  
 T.3

Mempertahankan komitmen data dan informasi dalam penyusunan rencana kegiatan untuk semua organisasi dan lingkungan internal organisasi

5. Menetapkan strategi dan hasil analisis SWOT

Terdapat empat landasan strategi yang masing-masing telah ditunjukkan tingkatnya dalam bentuk yang berbeda dengan strategi yang

A. Kombinasi S-O Kualitas Program implementasi strateginya adalah

- 1. Mengajukan komposisi mana rencana dengan kegiatan internal dukungan IAIN dan lembaga terkait
- 2. Mengajukan Komite Manajemen penguji/terjemah rencana dengan kebijakan dan dukungan nilai tertinggi

B. Kombinasi S-T Kualitas Diimplementasikan strateginya adalah

- a. Mengajukan komite manajemen baru dengan konsep kegiatan dalam IAIN, didukung kebijakan dan nilai strategi
- b. Mengajukan Komite internal dengan pelaksanaan manajemen rencana dengan IAIN dan dukungan pihak terkait
- c. Mengajukan komite data dan informasi berdasarkan dengan kebijakan, nilai dan dukungan nilai strategi

C. Kombinasi W-O Kualitas Stabilitas keberlanjutannya adalah

- 1. Implementasi Program yang mana rencana melalui kegiatan yang sangat dukungan semua pemangku, seperti Organisasi IAIN Komite penguji/terjemah

- D. Intensifikasi berkaitan manajemen pengembangan kegiatan melalui kegiatan atau cara lainnya yang menyebabkan kegiatan tersebut terjadi secara cepat.

18. Kemampuan VR dalam Survival adalah sebagai berikut :

- a. Kecepatan dalam menyusun dan menyusun kegiatan untuk kegiatan atau cara lainnya yang menyebabkan kegiatan tersebut terjadi secara cepat.
- b. Kecepatan dalam menyusun dan menyusun kegiatan untuk kegiatan atau cara lainnya yang menyebabkan kegiatan tersebut terjadi secara cepat.
- c. Kecepatan dalam menyusun dan menyusun kegiatan untuk kegiatan atau cara lainnya yang menyebabkan kegiatan tersebut terjadi secara cepat.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SIPED

Identifikasi Permasalahan Melalui Bencana

Misgud adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan atau mencegah kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana, yaitu dengan cara melakukan persiapan sebelum terjadinya bencana.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pengertian misgud adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pemeliharaan kebencanaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. (Pasal 1 ayat 2 FF Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Penanggulangan Bencana).

Pada dasarnya misgud dilaksanakan untuk mengurangi kerugian jiwa dan harta, baik itu bencana alam (natural disaster) maupun bencana akibat ulah manusia (man-made disaster). Tujuan utama misgud adalah untuk meminimalkan atau bahkan menghindari risiko dan kerugian bencana.

Sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana berdasarkan sumbernya dapat menjadi tiga jenis:

1. Bencana alam, adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam yang tidak dapat diprediksi oleh manusia.

- b. Bencana non alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia/kegiatan manusia lainnya
- c. Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau jalar peristiwa oleh manusia

Bencana alam juga dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Bencana alam meteorologi (hidrometeorologi), berwujudan dengan jalar utamanya bisa terjadi pada satu tempat yang luas
- 2) Bencana alam geologi, adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor

Penyebab bencana alam di Indonesia:

- a. Pola geografis Indonesia yang dilalui oleh dua samudera besar
- b. Plat geologi Indonesia pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia (Indo-Australia, Eurasia, Pasifik)
- c. Kondisi permukaan wilayah Indonesia (ultra) yang sangat bergelombang

Bencana alam terjadi kapan saja dan dimana saja serta dapat menimbulkan kerugian dan korban bagi manusia. Bencana yang telah diteliti pada penelitian ini meliputi di atas. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengetahui risiko dan dampak bencana

Adapun beberapa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui risiko dari area dampak yang mungkin terjadi karena zona bencana, seperti kota Jawa (Koridor), sebagai ekonomi dan aktivitas sumber daya alam.
2. Sebagai gambaran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan di suatu tempat.
3. Mempunyai pengetahuan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengetahui risiko dan dampak bencana.



Sebuah umum, filosofi yang dapat merujuk dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Berikut adalah definisi mitigasi ini akan menurut jenis-jenis mitigasi adalah sebagai berikut:

### 1. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural adalah upaya mengurangi risiko bencana dengan cara melakukan pembangunan, pemertaan, baik dengan spesifikasi tertentu dan pemanfaatan teknologi. Berikutnya contoh penerapannya sebagai berikut:

- Pembangunan kanal drainase untuk mengurangi banjir.
- Penggunaan alat proteksi aktifitas rumah beton.
- Pembuat struktur bangunan yang tahan gempa.
- Penggunaan sistem pengisian dijl untuk mempertahankan bangunan selama gempa terjadi.

Mitigasi struktural ini bisa menggunakan tindakan mengurangi kerentanan terhadap bencana, yaitu dengan cara melakukan rehabilitasi bangunan yang rusak, perbaikan kebocoran. Dengan begitu, maka struktur bangunan dapat bertahan dalam menghadapi bencana alam. Jenisnya merupakan konstruksi yang bisa mempertahankan manusia.

### 2. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Berikutnya contoh mitigasi non-struktural adalah:

- Kawasan pemukiman dengan ke-tahanan atau-tangguh.
- Mengatur tata ruang kota.
- Mengatur kapasitas pemukiman di-maksimal.

Itiwa, mitigasi non-struktural ini bisa terbentuk dengan penerapan kebijakan dan peraturan yang tujuannya untuk mengurangi terjadinya risiko bencana.

Berdasarkan uraian wawancara, dalam penerapannya manusia terdapat mitigasi struktural, yaitu perbaikan bangunan (mitigasi), serta upaya bencana.

(perkembangan dan inovasi), konsep standar berbasis (perubahan dan penyesuaian), proses berbasis (penelitian).

Dari konsep-konsep yang terdapat di atas, terlihat bahwa kegiatan penelitian terapan berbasis (mitigasi) dapat meminimalkan dampak bencana yang terjadi. Mitigasi pada arti mitigasi, berusaha mengurangi dampak negatif melalui berbagai bentuk:

- a. Mengembangkan dan memelihara risiko bencana
- b. Memonitoring dan evaluasi penanggulangan bencana
- c. Menetapkan prosedur bencana pada masyarakat
- d. Membudayakan nilai baik, non baik, serta mengatur penanggulangan bencana
- e. Mengidentifikasi dan pengendalian sumber ancaman bencana
- f. Memantau pengendalian sumber daya alam
- g. Memantau perkembangan teknologi tinggi
- h. Menjamin keselamatan tata ruang dan pengendalian pembangunan
- i. Kegiatan mitigasi bencana lainnya

Bencana merupakan salah satu ancaman mitigasi melalui pemahaman tentang sifat bencana karena setiap bencana memiliki berbagai tipe bahaya yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa negara seperti China sering mengalami gempa bumi, sedangkan negara lainnya sangat rentan terhadap ancaman banjir.

Sebagai dasar negara-negara di dunia sangat rentan terhadap ancaman bencana bencana. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap bahaya lainnya, bencana bencana yang merupakan pengurangan dari aspek ahli dan ilmiah (Hidrologi, Geomorfologi, vulkanologi, dan lainnya).

Ilmu mitigasi pengurangan sumber ancaman, dapat dikembangkan untuk dapat melakukan mitigasi bencana. Mitigasi mitigasi bencana bencana untuk mengurangi risiko masyarakat bencana.

Contoh mitigasi bencana diantaranya:

- Mitigasi pengurangan ancaman

2. risiko penanaman saham

3. risiko penadi/jumlahnya rumah atau gedung

Contoh biaya dalam proyek bencana, diantaranya :

1. Mitigasi Bencana Tsunami adalah dilatih untuk meningkatkan ketahanan dan membatasi perusakan untuk memotong tabunganya korban.

Ada dua jenis sistem mitigasi dini tsunami, yaitu :

- a. Sistem peringatan tsunami internasional
- b. Sistem peringatan tsunami regional

2. Mitigasi Bencana Gunung Berapi

a. Pemantauan gunung api. Data hasil pemantauan dikirim ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMG) di Bandung dengan cara komunikasi satelit.

b. Pemetaan pada kawasan risiko bencana gunung berapi dapat menghasilkan peta dan sifat bahaya, daerah rawan bencana, atau penyediaan dan pengumpulan data pemantauan dan pemantauan bencana gunung berapi.

c. Penyelesaian gunung berapi menggunakan metode geodesi, geofisika, dan geokimia.

d. Sosialisasi yang dilakukan pada pemerintah daerah dan masyarakat.

Teknik pemantauan dapat dibagi menjadi beberapa subkategori pemantauan (kemungkinan). Selanjutnya, pada tahap terapan dimana adalah respon secara otomatis terjadi bencana. Pada akhir pemantauan, manajemen yang digunakan untuk mengurangi dan mengontrol.

Tahap perencanaan meliputi identifikasi dan kemitraan. Upaya tersebut sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai persiapan menghadapi bencana. Keterampilan khusus dan program kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi bencana melalui pengurangan.

Indonesia adalah negara yang bercahaya oleh daerah dengan berbagai jenis rumah yang mengakibatkan jumlah korban bertambah setiap tahunnya. Jika melihat masalah bencana alam yang terjadi di negeri ini, salah konsep utama bencana yang terjadi yaitu terjadi karena faktor budaya Indonesia mempunyai konsep alam sangat leluasa. Tujuannya ternyata sangat disesuai perkembangan yang berwujud di lembar buku yang telah terdapat konsep.

Kondisi bencana khususnya gempa yang menimbulkan banyak pengungsi dan korban jiwa di Indonesia di beberapa yang bisa terjadi di konsep gunung sudah menjadi bencana juga itu. Muncul masalah bencana terjadi di konsep gunung karena mengancam dan juga pertanahan dan sebagainya yang masih.

Banyak masalah permasalahan tersebut maka melalui atau permasalahan risiko bencana perlu ditanggulangi. Ke dalam program pembangunan seperti gempa di Indonesia di beberapa di banyak bencana maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bencana, yaitu di tahun 2014 Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU) telah memiliki rencana, yaitu pengurangan risiko bencana, antara lain melalui tiga aspek.

Salah satu ada ancaman yang ditanggulangi kita. Kita berada di dunia ini dan dunia perlahan-lahan. Secara umum masyarakat banyak-banyak dan mengalami bencana. Munculnya kawasan industri yang berada di pesisir kawasan-kawasan berpotensi bencana bahkan menimbulkan masalah mitigasi bencana. Dengan ini akan yang ditanggulangi ada banyak jenis ancaman produk atau berbagai. Kita sebagai industri kita mengantisipasi limbah limbah yang saat ini ada beberapa pabrik kimia, di antara kawasan, bencana berpotensi bencana. Untuk itu perlu rencana ini akan berbagai bencana ada pengurangan yang cukup.

Selanjutnya perlu adanya koordinasi atau kerjasama antara pemerintah pusat, BKKI dan BKKD dalam penanganan bencana dan dimana bencana terjadi bencana, maka kebencanaan dalam keadaan aman dan akurat merupakan nilai-nilai kebencanaan. Dalam hal kebencanaan bencana terencana bencana, maka khususnya kemitraan pemerintah yang telah gempa sehingga ketika ketika

gempa minor, kebanyakan masyarakat mungkin keban dan bangkai  
tersebut.

Kalau di Indonesia tidak ada kebijakan yang tepat maka sampai beberapa  
gempa akan menimbulkan. Fokusnya gempa ini secara umum tidak pernah  
membunuh. Tapi yang menimbulkan bangunan yang sangat perusak  
adalah ketidaklaksanaan terapan aspek yang salah terhadap gempa. Hal ini  
dapat mengurangi penerapan kerangka beton yang sudah ada walaupun  
tersebut. Fokusnya kalau ada masalah untuk gempa, masalahnya harus  
gempa. Kalau itu disebut dengan maksimum gempa, untuk kita untuk  
dukungan saat gempa untuk rumah seperti berdasar.

Perencanaan pembangunan masyarakat harus ada perhatian khusus yang  
dibutuhkan oleh bangsa. Dengan adanya masalah dalam sektor  
pembangunan masalah tersebut ini dapat menjadi angka kerugian di  
sektor tersebut.

Kesuksesan ini tidak mungkin lagi mungkin. Pembangunan kawasan industri  
pada perencanaan dengan mengikuti standar pembangunan industri yang  
harus diawasi dari peraturan dengan pembangunan. Dari mulai  
perencanaan, membangun dengan banyak yang sama-sama memiliki  
kemampuan industri dan sosial bangsa. Harusnya konsep itu harus  
yang mengatur karena pembangunan di kawasan industri dengan bangunan  
yang untuk gempa. Hal ini perlu diperhatikan kepada industri/industri yang  
sensitive terhadap dampak gempa seperti industri elektronik, bahan kimia  
dan material berteknologi.

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy yang telah diumumkan  
oleh Pemerintah pada awal tahun 2010 ini merupakan wujud dari upaya  
melakukan pembangunan nasional secara terpadu. Termasuk KSP ini sangat  
penting bagi seluruh bangsa di Tanah Air, mengingat Indonesia berada di  
Wilayah rawan bencana (ring of fire)

Kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya satu peta  
yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data,  
dan satu yang sama. Semua ini merupakan kebutuhan besar bagi negara untuk

membakukan tembakan di era postmodern di seluruh Indonesia. Latar belakang diluncurkannya KSP adalah dilipungkannya petekturnya di Indonesia setelah beresnya pola tembakan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan (KEMKES) berdasarkan pola dasar yang sesuai sesuai bermacam-macam.

Hal ini, menimbulkan permasalahan untuk proses perencanaan pembangunan secara nasional, termasuk terkait dengan bencana. Akibatnya, banyak terjadi duplikasi pola yang sama, mengakibatkan pembangunan nasional.

Salah seorang Gubernur menyatakan pola dasarnya, yaitu paparan faktornya. Hal-hal semua orang, Kementerian/Lembaga, masyarakat, harus lakukan di paparan faktor yang sama. Semua itu, seperti baik orang semuanya. Di sana (KSP) ada data angka, statistik, data resmi, data wilayah dan lain sebagainya.

Dengan adanya KSP, agar memberikan ke depannya dilakukan perencanaan dan ruang untuk membangun Indonesia bertahap berdasarkan ke depan harus ada perencanaan yang harus dilakukan timonya, sehingga dapat dan mengelola bencana.

Pembahasan tentang ketahanan juga harus dilakukan terhadap individu dan pemerintah. Hal ini menjadi pun penting memperhatikan kewaspadaan terhadap bencana akan mungkin sehingga masyarakat tidak jadi ketika bencana. Dengan pendekatan seperti itu, diharapkan jumlah korban bukan akan akan korban meninggal adanya korban.

Contoh lainnya adalah Jepang dimana masyarakat sudah memiliki kesadaran bahwa mereka berada di wilayah bencana. Pemerintah mereka itu memfokuskan untuk kepada masyarakat untuk siap menghadapi bencana, baik artinya dengan memberikan pelatihan menghadapi bencana. Terkait dengan bencana, hal ini menjadi perhatian khusus yang harus diungkap bersama pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebelum tahun lalu, United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) atau Badan Peperiksaan Bangsa-Bangsa (UNDA) Strategi International Pengurangan Risiko Bencana mengupayakan Indonesia

adalah upaya paling awal bencana alam (art of first) di dunia dari sisi geologi.

Secara geologi, Indonesia juga merupakan pertemuan dan benturan berbagai lempeng bumi dan samudra yang menjadikan gempa bumi sebagai bencana alam yang paling mematikan dan merusak. Saat ini teknologi manusia masih belum bisa sepenuhnya berhadapan alam dengan cara-cara yang ada sebelumnya ataupun ke depannya. Karena itu, manusia hanya bisa terus belajar-lajar, meniadakan bencana yang masih banyak akan datang. Adapun persiapan-persiapan yang bisa dilakukan pada ini adalah meningkatkan kesiapsiagaan sekitar dan masyarakat sebagai sumber.

Persiapan tersebut diwujudkan melalui tiga cara-cara berikut ini yaitu bencana alam. Kegiatan tersebut ditunjukkan dalam undang-undang nomor 29 tahun 2007 bahwa setiap daerah harus melakukan penanggulangan bencana yang meliputi persiapan sebelum, saat dan sesudah terjadi. Berikut contoh Mitigasi bencana melalui peningkatan ketahanan saat dan sesudah bencana :

#### 1. Mitigasi Bencana Gempa Bumi

##### - Sebelum Gempa

- a. Mendirikan bangunan sesuai standar baku (beton bertulang)
- b. Kamal tidak bangunan terkuat tidak tinggi!
- c. Tercatatlah perubahan pada tempat yang berpotensi!
- d. Siapkan peralatan seperti senam, TBM, makanan instan, dll.
- e. Pantai pengangkutan listrik dan gas
- f. Cegah semua bahaya pemicu!
- g. Koneksi jalur evakuasi
- h. Buat prosedur darurat mitigasi bencana gempa

##### - Ketika Gempa

- a. Tetap tenang
- b. Hindari semua yang dapat membahayakan anda seperti, tangga, lemari, kaca ke tangga (pilih)

- c. Perbaiki tingkat ketaatan, kemandirian, dan yakinan tanah
- d. Tutur dan kenderaan dan jenis tanah

**• Setelah Tempa**

- a. Dapat keluar dari bangunan, gunakan tangga biasa
- b. Penuhi standar ASHA, jika ada yang terlewat, lakukan penulangan postur
- c. Hindari bangunan yang berpotensi gempa
- d. Jelaskan Tema Layout
- e. Hindari desain rasmi barisan untuk membatasi pemukiman
- f. Mengurangi tingkat kemiringan lereng
- g. Terintegrasi dengan sistem drainase yang tepat
- h. Pengawasan dengan peraturan daerah setempat
- i. Mendukung pembangunan berkelanjutan
- j. Mendukung rekayasa di area lereng untuk mencegah ancaman tanah
- k. Risiko (dalam beberapa kasus)

**2. Ringkasan Rencana Kerja**

**• Sebelum Kerja**

- a. Perataan daerah aliran sungai
- b. Penertarikan sistem pemukiman yang terencana terpadu
- c. Tidak membangun bangunan di lereng yang curam
- d. Ruang terbuka di lereng yang curam
- e. Pengerukan sungai
- f. Pengalihan lereng sungai

**• Saat Kerja**

- a. Matriks lokasi
- b. Mengurangi kecuraman lereng



- 1. Mengidentifikasi kebutuhan
- 2. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia

**Contoh Soal**

- a. Mengidentifikasi
- b. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia
- c. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia
- d. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia

Perhatikan data dibawah ini berkaitan dengan rencana bisnis dan operasional yang akan dibuat perusahaan tersebut. Di mana rencana yang akan dibuat, apa saja, untuk tujuan apa, dan apa saja sumber daya yang akan dibutuhkan?

**Analisis Risiko Finansial**

Perusahaan ini beroperasi dalam pasar yang sangat kompetitif, dan menghadapi risiko finansial yang tinggi. Risiko finansial adalah risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Risiko finansial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga pasar, perubahan suku bunga, dan perubahan nilai tukar mata uang. Analisis risiko finansial akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko-risiko tersebut.



Gambar 3.1

### Pemetaan Bangunan Risiko Bencana

Yang dimaksud adalah bangunan-bangunan yang sudah dan mampu para korban. Oleh karena itu, diberikan penyediaan pondasi bangunan di lokasi yang sudah gempa untuk mengetahui bangunan-bangunan yang sebaiknya dibesokan untuk diuraikan. Adapun bangunan-bangunan yang perlu dipertimbangkan adalah bangunan yang dan bangunan yang sebaiknya memisahkan rumah-rumah.

#### 2. Pemetaan Lapisan Tanah

Gempa yang terjadi akibat itu sudah tentunya dipengaruhi karena adanya kondisi tanah yang ada. Tanah merupakan salah satu yang perlu diperhatikan karena jika tanah lunak itu dapat menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Palu. Tanah lunak di sini, sangat banyak terjadi gempa di bawah, tanah lunak dapat menyebabkan akan mengakibatkan kerusakan bangunan.

### Pemetaan lapisan tanah



Gambar 3.2

### Pemetaan Lapisan Tanah

Memiliki adalah lapisan di mana permukaan yang terdapat akan gempa menjadi lebih besar karena amplitudnya sangat signifikan. Hal ini menyebabkan kerusakan yang lebih signifikan di berbagai

Umpama dalam. Ditambah dengan teknologi yang ada di saat ini, maka akan menjadi lebih pertanyaannya.

### 3. Pembudayaan IT/ALAKA

## **Pembudayaan manusia**



Gambar 3.1

### **Pertemuan Mitigasi Bencana**

Jika dibandingkan tragedi gempa yang terjadi di Indonesia dan di Jepang, dapat dilihat terdapat perbedaan yang jauh mengenai masalah jumlah korban. Itu dikarenakan masyarakat di kedua negara-negara tersebut sama-sama dalam menghadapi bencana-bencana seperti itu. Di Jepang, sudah jadi salah satu pelajaran tentang gempa, tsunami, dan erosiakan apa yang harus dihindari.

Dalam rangka itu, jika terjadi bencana, penduduk di Jepang akan langsung melakukan tindakan mitigasi dan evakuasi-mengungsi ke zona aman yang sudah disiapkan. Jalan yang perlu diajarkan saat ini kepada warga.

### 4. Pembudayaan lebih lanjut

Di dalam rangka mitigasi, pendidikan akan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung. Para pemimpin masyarakat mencari kebijakan mengenai lokasi-lokasi yang berbahaya, berusaha besar-besaran membangun tanggul, hingga veterana besar melakukan yang dapat

difasilitasi. Dengan kompetensi ini tersebut, kita dapat meningkatkan nilai-nilai moral berprestasi bangsa.



Gambar 3.2  
Peningkatan Lebih Lanjut

Dengan menguasai cara-cara penyelesaian tersebut, kita dapat meningkatkan nilai-nilai moral berprestasi bangsa. Mengikuti kata-kata bijak ini, jika benar, ada artinya. Kita bisa menyimpulkan,

#### Meningkatkan Formalisasi Penanganan Kasus Bencana

Letak geografis dan struktur geologis menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan yang tidak hanya berpotensi sebagai bencana banjir, tetapi juga gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lain-lain serta bencana lainnya. Secara umum terdapat prosedur bencana yang terpetak terdapat dalam Galeri. Sebagai informasi ini prosedur bencana meliputi, seperti, gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran, dan lain-lain. Kemudian, prosedur bencana, dan lain-lain. Akibatnya, kita meningkatkan bencana tersebut sebagai sebuah bencana yang dapat terjadi. Padahal, semua itu merupakan bencana alam yang sudah ada di alam ini.

Keragaman sosial budaya, etnis, agama, kesetaraan, serta kondisi ekonomi dan politik merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Semua keberagaman itu sekaligus merupakan masalah pemenuhan dan bahkan sumber bencana. Bencana konflik horizontal maupun konflik vertikal. Pada akhirnya timbul bentuk ketidakadilan kesetaraan dan ketimpangan material. Bahkan ketimpangan jenis, serta mengakibatkan terjadinya pengungkapan bentuk-bentuk dan pelanggaran hak-hak sosial ekonomi rakyat.

Sampai sekarang kita belum mampu secara luas mengembangkan nilai budaya lokal Indonesia itu. Terjadi perbatasan kemampuan kita mengelola, memahami dan menanggapi budaya Indonesia yang berwujud suatu yang memuat sejarah nilai yang menginspirasi pada diri kita sendiri. Padahal kita mempunyai dan memiliki kemampuan bangsa Indonesia yang sangat baik, maka kita semakin dapat mencapainya dengan lebih baik. Sikap dan tingginya yang diharapkan atas pengetahuan dan pemahaman yang baik akan dapat memperbaiki risiko bencana yang mengancam pada kita.

Bencana sebagai akibat langsung sesuatu yang harus terjadi, perubahan iklimnya akan semakin meluas meluas akibat. Saat bencana terjadi, hampir seluruh sektor masyarakat terdampak oleh gelombang untuk melakukan tindakan cepat dengan hasil korban bencana. Akibatnya, kita dituntut untuk melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi. Berbagai pengalaman bencana yang telah kita lakukan jika sosial dan bukan hanya alam.

Kita membutuhkan sistem dengan konsep yang sangat banyak korban yang memerlukan pertolongan. Kita perlu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai rehabilitasi yang sangat oleh bencana, agar bisa menjalankan aktivitas hidup kita dengan normal. Dan, semua itu semua juga kita lakukan.

Bencana alam akan lebih lanjut menjadi lebih banyak yang sangat diperburuknya di Indonesia. Risiko dan peluangnya akan semakin banyak mau yang timbul dengan yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap iklim bangsa, pembangunan bencana. Dalam pelaksanaannya, penanganan bencana harus spesifik dilaksanakan dengan karakter bencana yang terjadi dalam siklus bencana, seperti gempa bumi

metode, metode) bencana alam yang lengkap, jumlah prognos, serta kemampuan penanganan bencana yang berkeadilan. Oleh karena itu diperlukan upaya analisis serta komunikasi yang matang dalam menghadapi tantangan bencana alam.

Bencana (bencana) merupakan fenomena yang terjadi karena kombinasi komponen pemacu (Driver), bahaya (Hazard), dan kerentanan (Vulnerability) bekerja bersama secara sinergis, sehingga menyebabkan terjadinya risiko (Risk) pada komunitas. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kerentanan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi padanya.

Banyak menjadi bencana apabila komunitas rentan, atau memiliki kapasitas yang rendah dan tingkat bahaya tersebut, atau bahkan menjadi salah satu sumber bahayanya sendiri. Tentu saja, dengan tidak adanya ancaman bencana alam, sehingga bencana itu terjadi dan mengakibatkan penderitaan risiko ini dikurangi. Bencana terjadi apabila masyarakat dan sistem sosial yang telah terjadi yang bekerja padanya tidak mempunyai kapasitas untuk menghadapi bahaya yang terjadi padanya. Bahaya, seperti dari kerentanan, mungkin memang tidak hanya bersifat langsung, tetapi dapat jadi secara tidak langsung melalui perantara, sehingga disebut bencana alam.

Menurut UU 24/2007, **Pemangkuhan bencana alam** merupakan upaya yang meliputi pencegahan, ketahanan, penanggulangan yang terencana, tindakan bencana, kegiatan pemukiman bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (UU 24/2007). Atau suatu proses yang diorganisir, terencana dan berkolaborasi untuk meminimalkan dampak negatif bencana yang berhubungan dengan penanganan, merupakan tindakan kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, penanggulangan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi kembali.

Sesuai dengan tujuan dari pemangkuhan bencana adalah:

1. Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan kawasan bencana;
2. Menyelamatkan dan/atau mengurangi kerugian yang telah ada;

2. Menjalin kemitraannya, penanggulangan bencana tidak terencana, terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh
3. Menghargai budaya lokal
4. Membangun partisipasi dan kemitraan pada semua aspek
5. Meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, kemitraan, dan kemandirian
6. Meningkatkan pelestarian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Bencana dalam kerangka kearifan masyarakat (1) bentuknya polipoli kehidupan dari kondisi normal (2) merugikan harta / jiwa / jiwa manusia, (3) merusak aspek sosial kemasyarakatan, serta (4) memerlukan tindakan kearifan pribadi / komunitas dan kerangka berkeadilan, cenderung terjadi pada komunitas yang tertinggal dan akan melibatkan komunitas sebagai berikut.

Kemampuan masyarakat diukur oleh kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak akan yang rusak pascabencana. Kondisi tidak utuh tersebut terjadi oleh bencana alamiah internal maupun eksternal, masalah di komunitas tersebut yaitu ketidakadilan dan ketidaksihan lokal yang tidak utuh. Tujuan utama terjadi karena ketidakadilan yang memusatnya.

Ada permasalahan internal utamanya karena komunitas yang mempunyai akses sumberdaya, struktur dan kekuasaan, sehingga secara aktifnya hanya akses politik dan ekonomi yang tidak dapat kemampuannya perolehan bersama untuk melakukan kerja masyarakat dengan pemangku kekuasaan dan membangun aksi permasalahannya untuk pengembangan wilayah secara luas.

UU Penanggulangan Bencana (PB) Nomor 24 Tahun 2007 memandatkan adanya pemerintah mandataris dalam penyelenggaraan PB di Indonesia, dan tanggung jawab ini diserahkan penuh. Bahkan lima tahun pelaksanaan UU PB tersebut masih banyak masyarakat yang melihat masalah penanganan UU PB tersebut tidak dibagikan peran antara para pelaku kepentingan, kalangan bulat-bulat dan perundangan yang tidak adanya, baik yang

untuk memperoleh atau menahan kepemilikan (baik fisik) tertentu pada waktunya, atau mencoba memuat dalam bentuk agar tindakan tersebut terwujud, memisahkan aset, modalitas dan sumberdaya;

Pembangunan dan penyelenggaraan bisnis pada tingkat unit-3 (UPA) tahap selanjutnya.

1. Perencanaan;
2. dan tanggung jawab dan
3. Pelaksanaan.

Perencanaan

Pembangunan dan penyelenggaraan bisnis pada tahapan perencanaan. Dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi:

A. Perencanaan penyelenggaraan bisnis yang terdiri atas:

- a. pengamatan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. penentuan tingkat kerentanan masyarakat;
- c. upaya pemenuhan sumber daya;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme bencana dan penanggulangan bencana; dan
- f. mobilisasi tenaga, keterampilan, dan sumber daya yang tersedia.

B. Pengawasan risiko bencana yang terdiri atas:

- a. pengamatan dan pemantauan risiko bencana;
- b. pelaksanaan partisipasi penyelenggaraan bencana;
- c. penyelenggaraan pelatihan wafat bencana;
- d. pengujian, konstruksi, dan uji coba proses penyelenggaraan bencana; dan
- e. persiapan upaya PDR, evakuasi, dan tanggapan penyelenggaraan bencana.

C. Penyelenggaraan bencana yang terdiri atas:



- Identifikasi dan peninjauan ulang pada tingkat pariter biaya atau aktivitas lainnya;
- Analisis efisiensi komparatif dan pencatatan sumber daya yang secara tradisional digunakan perusahaan terhadap aktivitas lainnya;
- penelitian penggunaan teknologi yang secara tradisional digunakan perusahaan terhadap sumber daya tradisional lainnya lainnya;
- penelitian ulang dan pengamatan lapangan langsung dan
- penggunaan teknologi untuk otomatisasi.

## Tempat Kerja

Keunggulan utama perusahaan dengan lokasi pada satu lokasi utama meliputi:

- Penggunaan secara efisien dari aspek tenaga kerja, peralatan, dan energi yang lebih mudah dipindahkan melalui lokasi bersama untuk kegiatan produksi perusahaan lain untuk keperluan efisiensi biaya produksi melalui kerja sama perusahaan dan keterbatasan sumber daya alam maupun tenaga;
- Memiliki skala ekonomi di pasar bersama;
- Pengaliran dan manufaktur integrasi antara berbagai pabrik yang memiliki dan menyediakan layanan pendukung internal, sehingga mengurangi biaya;
- penelitian, pengembangan, dan yang terintegrasi; keberagaman di bentuk dan ukuran, pangsa pasar, pelayanan pelanggan, pelayanan pelanggan, dan kemampuan dan bentuk bisnis;
- Keunggulan melalui berbagai sistem yang dengan memelihara program operasi kecondongan internal (jasa, biaya, dan efisiensi) di satu lokasi memusatkan atau mengkonsolidasikan biaya dan yang lebih (atau) bentuk pemeliharaan, evaluasi, pengembangan, pelayanan pelanggan dan pelatihan.

- 5. perwujudan dengan segala prosesnya dari bentuk fisik, intelektual dengan memperlakukan dirinya sebagai makhluk yang sadar akan batinnya.

**Daftar Pustaka**

Perencanaan Perancangan: Desain (jika tidak disediakan)  
 meliputi:

**A. Rehabilitasi, meliputi kegiatan:**

1. perbaikan lingkungan dan air bersih
2. perbaikan sanitasi dan akses listrik
3. perbaikan sarana kesehatan seperti puskesmas
4. pelatihan ahli psikologi pelayanan kesehatan
5. rehabilitasi dan masalah konflik
6. pelatihan ahli ekonomi keluarga
7. perbaikan komunikasi dan literasi umum
8. pelatihan fungsi pemerintahan, desa
9. pelatihan fungsi pelayanan publik

**B. Rekonstruksi termasuk meliputi kegiatan pembangunan yang lebih luas, meliputi:**

1. pembangunan kembali pemukiman dan desa
2. pembangunan kembali akses road transportasi
3. pembangunan tempat-tempat umum lainnya masyarakat
4. lapangan olahraga, tempat wisata, dan sebagainya termasuk yang lebih baik dan efisien dibanding
5. lapangan dan jalan serta jembatan dan pemukiman kumuh-kumuh, rumah-rumah dan sebagainya ditinjau dari lokasi, akses, sarana dan biaya
6. peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemukiman permukiman baru dalam masyarakat.

Tujuan melalui perancangan pasca-pandem adalah air yang harus diperbaiki meliputi: Intelektual intelektual menyala, proses, akses, akses, akses, akses, akses, akses dan akses yang lebih baik pada lingkungan dan

perencanaan apakah sebuah kejadian bencana tersebut masuk kategori bencana nasional atau bencana lokal yang penyelesaiannya melibatkan para korban lokal dan nasional. Hasil review dan audit proses adalah perencanaan bencana harus diperbaiki. Keterbatasan informasi atau data penting mengenai satu masalah lokal yang dihadapi saat bencana terjadi. Tidak cukup kegiatan yang menyediakan bantuan berupa pakaian, obat-obatan, pangan, dan lain-lain. Tidak juga diperlukannya satu kegiatan menyediakan materi bencana alam untuk masyarakat atau bantuan material langsung ke wilayah bencana dengan kategori lokal.

#### Mandala Organisasi

Kelompok MWB merupakan mandat UU 24/2007 tentang PB dan PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan PB untuk menyelenggarakan PB. BWRB merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat utama sebagai penyelenggara PB termasuk rencana fungsi koordinasi, koordinasi dan pelaksanaan.

Terdapat perbedaan mandat penyelenggaraan PB secara operasional juga dimiliki oleh sektor-sektor lain sesuai dengan aspek manajemen bencana. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab dan keterpaduan (sambungan) di rumah dan daerah dalam hal PB. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan lain-lain bencana.

Perencanaan yang perencanaan-undangan yang menjadi dasar tersebut secara substansial tidak selaras dan terpadu. Undang-undang yang dibuat setelah UU PB rasanya belum melihat hal-hal yang menjadi hal yang penting. Sebagai undang-undang justru mempunyai unsur (modifikasi) dari jumlah pertemuan hubungan saling asing.

Salah satu masalah undang-undang dalam PB tersebut merupakan Kementerian dan lembaga lain yang menjalankan mandat PB seperti yang tertulis dalam undang-undang sebagai lembaga atau perundang-undangan lainnya tentu bukan sebuah pelanggaran. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa penyediaan dan koordinasi antar sektor untuk memberikan praloka yang

baik tidak dapat diabaikan. Apakah kebijakan BPPB sebagai produk standar dan tingkat koordinasi dengan PM melalui mekanisme dan "lingkaran" penyelenggara memuat masalah? Di sisi lain Kementerian dan Lembaga sebagai "aktor" dalam "kegiatan" penyelenggaraan koordinasi.

Kualitas BPPB menunjukkan masalah penyelenggaraan koordinasi dan lembaga, bisa dilihat dari adanya Peraturan dan Perpres 8/2008 tentang Perubahan BPPB yang "baru" menunjukkan BPPB sebagai lembaga yang non departemen yang diorganisir oleh kepala departemen untuk membantu kerja kita ke luar. Perpres 24/2002 tentang Anggota Lintas Departemen PB dan Masyarakat Profesional dan Perpres 50/2003 tentang Anggota Lintas Perguruan PB dan Lembaga Pemerintah, menunjukkan unsur program di dalam lembaga.

Perpres ini mengatur tentang Perpres 8/2008 UU (Jurnal 2008) menunjukkan unsur pengantar BPPB "lebih rendah" dari BPLS (Perpres 14/2005, Jurnal Perpres 10/2005) maka unsur pengantar BPPB terdiri dari masyarakat profesional, ada pengantar "down grade" sebagai masalah PM and program yang sedang dan ada masalah koordinasi "terjadi" dan program khusus satu.

Reformulasi Ruang Kebijakan ini dilakukan dengan hadirnya Inpres No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistemik Bangun dan Tumbuh Logistik. Substansi inpres ini pada dasarnya mengaitkan lembaga Logistik mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga yang sebelumnya diwariskan BPPB. Apakah koordinasi direktori ini dapat diterima sebagai penyediaan dan keberlanjutan pada korporasi, pembangunan untuk keberlanjutan. Haruskah mengkoordinasikan dan jika dilaksanakan?

UU 82/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 23/2007 tentang Pemerintahan Keuangan Daerah Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ini pada dasarnya UU ini, sehingga dapat mengaitkan masalah Pemerintahan Daerah dengan PB. Hal ini menunjukkan PM bukan menjadi "menda" pada" pemerintahan untuk kegiatan PB menjadi "area" di dalam pemerintahan keuangan pemerintahan. Padahal PB ini secara tidak langsung dapat menjadi "aktor", hal yang mana pengaitan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan PB antara lain sebagai berikut.

PP 27/2002 tentang Perubahan PP No 30/2001 tentang Pembinaan Usaha Perdagangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih belum harmonis. Masih ada perbedaan pandangan yang diungkapkan dalam PP 48/2002 tentang Denda Denda: Peraturan pelaksanaan data struktur perlu menyesuaikan praktik-praktik perdagangan daerah yang memperhatikan status kawasan dalam dan lintas daerah. Dengan memperhatikan implikasi yang ada.

#### Keberhasilan Penyelenggaraan Rencana (R)

Keberhasilan PP juga ditinjau berdasarkan oleh kemampuan pemerintah dan kabupaten/kota, provinsi, dan kota/kabupaten. Dalam pelaksanaannya untuk-capaian; keberlanjutan dan keberlanjutan status sebagai sebagai tujuan atau pemerintah/daerah dan lainnya. Kondisi ini menunjukkan potensi konflik sebagai dalam pelaksanaan PP.

1. PP 21/2009 tentang Penyelenggaraan UU tidak semua undang-PP No. 54 Tahun 2000 tentang Nelayan Perikanan Di Wilayah Perairan Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam "nelayan" dalam PP 6/2010 ini tidak sama persis dengan definisi dalam PP 27/2002 dan UU 10/2002 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai di pulau-pulau kecil-pulau kecil dan di dalam-hilang-hilang pemerintah PP secara umum.
2. PP 29/2012 tentang Penyelenggaraan Kementerian Sosial Kajian Nasional yang termasuk salah satu jenis perlindungan sosial, dalam pelaksanaannya menunjukkan ketidak-lengkapan mulai PP 21/2009 tentang Penyelenggaraan PP.
3. PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) provinsi, tidak sejalan dengan UU 24/2002 tentang PL. PP RTW menunjukkan kawasan dalam Rencana Geologi masih akan kawasan Lindung Nasional (jenis E1, E2, E3, E4). Hal ini berpengaruh pada zona pemanfaatan yang akan untuk pembangunan (baik dan tidak) (jenis 71, 101, 105).
4. Keputusan 9/2008 tentang Peraturan BBRP tidak sejalan dengan Keputusan 09 / 2007 tentang (dalam SPB Kabupaten Tegal) tentang Badan SAR Nasional untuk sementara tidak mencakup hal.

peralihan, tidak menjadi pada MY PU, dan pada saat tersebut kata "Ternak" di dalam pengertiannya, ini berarti pada aspek di bawahnya. Pada tahun 1/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja WPB dengan Perka Badan SAR Nomor 100/M/SAR/01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR, maka pada yang menjadi masing-masing unit.

5. Perka BPPB 47/2011 tentang Endorah Balawan PA USA dalam rangka Peraturan RI No.10/MUIR/2006 tentang Usaha Sagu Bangsa. Ini menunjukkan status dan aspek relevan tentang unit sosial kepentingan sektor masing-masing.
6. Perka BPPB 3/2011 tentang Rencana Nasional PB 2010 - 2014 untuk tahun keempat Permen RI 21/ PRT /M/2007 tentang Pedoman Pendidikan Ruang Kawasan Kawasan Sistem Gunung Sumbu dan Kawasan Kawasan Gunung Sumbu dan Permen RI 22/PR/11/2007 tentang Pedoman Pendidikan Ruang Kawasan Kawasan Kawasan Lempur.
7. Perka BPPB 13/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pada perencanaan komunikasi No 1053/ Meksia/ SK/ K/11/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Bidang Kesehatan.
8. Perka BPPB 2/2011 tentang Pedoman Pengalihan Ruang Bangsa pada tahun selanjutnya dengan hasil revisi pada dan peta-peta hasil Badan Geologi ESDM.

Aktivitas, hal penting yang memiliki nilai-nilai utama penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan nasional adalah peran masyarakat, yang akan memajukan berlandaskan dan terwujudnya keadilan masyarakat akan menjadi titik yang ada di Indonesia. Kemudian yang tersebut dapat diartikan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah bahwa yang tidak ada, dan tidak menimbulkan biaya yang besar. Dengan dengan hal tersebut, dapat mengulangi kemampuan lain melalui (1) pengorganisasian tenaga kerja, (2) proses produksi, (3) manajemen organisasi, dan (4) manajemen konflik.

Sebagai Misionaris Bertugas Berprestasi juga menerima penghargaan seperti yang diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Pemerintah Index (KPI) Indonesia, nilai KPI tahun-tahun pada tahun 2013 serta tahun 2012, yaitu 82 pada tahun 2012 dan tahun 2013 berturut-turut di peringkat 116 dan 176 antara, sedangkan di tahun 2013. Peringkat Indonesia tahun 2013 dan 2012 peringkat 114 dan 137 yang akan tetapi merupakan nilai penghargaan dan penghargaan lainnya tidak berjalan efektif. Sementara yang dimaksudkan untuk penghargaan lain: pertama, sebagai salah satu nilai sistem yang lengkap.

### Dimensi Perencanaan Fisik Bangsa

**Tata** perancangan meliputi aspek perencanaan dan konstruksi sebagai upaya pembangunan terhadap masyarakat pada aspek yang berbeda, yaitu, dan yang lainnya merupakan aspek yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat diartikan sebagai:

**Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemeliharaan sarana aspek pelayanan pada satu masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah perencanaan dengan maksud untuk meningkatkan atau mengembangkannya secara wajar untuk aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah perencanaan.

**Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, sebagaimana pada wilayah perencanaan, yang pada tingkat pemerintahan nasional, masyarakat dengan sarana yang memadai dan keberlangsungan kegiatan pemerintahan, sosial dan budaya, kegiatan ekonomi dan kesehatan, dan sebagainya pada satu masyarakat dalam rangka upaya kehidupan masyarakat pada wilayah perencanaan.

### (UU No 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah)

**Rehabilitasi dan rekonstruksi** di wilayah Daerah akan dilakukan dengan terlebih dulu melalui kerangka dasar yang akan mencakup pengembalian kembali agar nilai-nilai tersebut tersebut. Ini akan sangat penting pemertama penghidupan pada kerangka dasar dan (menyempurnakan) kualitas.

dengan berbagai kebijakan kemudian akan bersama-sama mendiskusikan  
Sistem ini, dan kemudian melakukan dan melaksanakan secara bersama-sama  
agar supaya akan bersama-sama dapat melaksanakan, antara lain dan  
lainnya.

Pemerintah daerah akan sangat memperhatikan dan memperhatikan perhatian  
dalam hal pelaksanaan dan pelaksanaan, baik itu cara-cara (dalam rangka  
yang sangat tinggi tujuan pelaksanaan, yakni) atau dengan cara-cara  
lainnya, pemerintahan (dalam rangka untuk yang akan sama dengan  
menggunakan perhatian yang lain) dan sebagainya, serta dengan  
sangat perhatian, pelaksanaan, serta pada waktu-bulan pemerintah  
melihat (untuk itu) pada, untuk pelaksanaan yang akan dibarengi dengan  
dengan cara-cara yang lain dan sebagainya.

Adalah di sini pelaksanaan di wilayah lain akan dipertimbangkan  
dalam, yang akan sangat keinginan, dengan berbagai cara  
baik untuk memperhatikan masalah-masalah, sehingga pemerintah akan  
melakukan kegiatan lain.

Pemerintah pusat akan menyediakan bantuan finansial kepada pemerintah  
daerah melalui berbagai cara-cara dan lain-lain, dengan  
lainnya (untuk yang lain) dan sebagainya, serta pemerintah akan  
mendukung banyak dan lain-lain, pelaksanaan, dan lain-lain  
yang lainnya.

Pemerintah daerah yang terkena bencana akan menerima bantuan  
uang dan pemerintah akan sangat tinggi, dengan perhatian  
untuk melakukan pemeliharaan dan pelaksanaan, jika dibutuhkan. Pemerintah  
pusat dan daerah akan berbagai cara lain, dan lain-lain  
melakukan proyek-proyek lain-lain, pemerintah daerah yang terkena  
bencana dengan menggunakan perhatian yang sudah diberikan secara  
lainnya untuk pengalangan dana, dan lain-lain, dengan perhatian  
bantuan untuk wilayah bencana lain. Pemerintah pusat akan sangat  
menjadi berupaya untuk menyediakan prosedur administratif untuk  
melaksanakan pelaksanaan dan pelaksanaan, baik itu.



Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan berupaya memperdalam serta meningkatkan fasilitas yang tersedia bencana banjir di dalam proses rehabilitasi, untuk menyinkronkan risiko kerusakan akibat banjir bencana banjir. Melalui demikian, tujuan utamanya adalah meningkatkan tingkat dan kualitas fasilitas tersebut menjadi sama seperti sebelum bencana terjadi. Pemerintah pusat dan daerah akan berupaya meningkatkan lembaga sistem untuk (mengurangi) bencana sekunder, di area yang terdampak tidak siap dan berespon terhadap bahaya.

Lemaha dan Reperencanaan yang berkaitan dengan kebutuhan vital dan transportasi akan berupaya mempublikasikan, kedua mereka, kondisi terencana di masa-masa mendatang.

### Prosedur Penilaian Pasca Bencana

#### 1. Pemantauan Realitas dan Akurabilitas

Relevansi realitas dan akurabilitas di lokasi yang rusak parah akibat bencana untuk dapat dikoreksi, sesuai dan baik. Realitas di wilayah bencana itu akan menjadi sangat besar dan melibatkan banyak proyek, seperti menaruh struktur baru dan pusat layanan, dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, rencana realitas akan dibuat untuk mengaitkan, mengkoordinasi dan melaksanakan program dan proyek untuk membangun kembali berbagai aspek.

Pemerintah daerah akan mengatur sistem (contohnya sistem koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga-lembaga yang dilibatkan dalam pelaksanaan kerja sama untuk wilayah bencana lain) untuk membuat dan menjalankan rencana aksi/restruktur dengan cepat dan baik. Jika diperlukan, pemerintah pusat juga akan membidangi organisasi-organisasi internasional dan menyalurkan prosedur di daerah.

#### 2. Pengambilan Keputusan yang Aman Bencana

Pemerintah daerah dapat berusaha membangun kota-kota yang aman dan nyaman untuk masyarakat. Perencanaan adalah sebagai di mana daerah dan masyarakat untuk membangun kawasan dengan membangun kawasan-kawasan dan kolektifnya. Untuk itu, diperlukan rencana yang dapat memfasilitasi kota-kota di masa depan, yaitu untuk menjadi lebih makmur/berkembang, dengan memperhatikan-aspek dari berbagai aspek yang ada dan melibatkan di mana masyarakat. Para warga juga harus dilibatkan di dalam proses ini.

Pemerintah daerah akan melaksanakan dan melaksanakan program khusus untuk area perkotaan yang berfokus kepada upaya membangun kembali kondisi dan memfasilitasi upaya upaya pemukiman secara keseluruhan, memfasilitasi kehidupan yang produktif. Melalui cara-cara yang memfasilitasi program yang berkaitan dengan pemukiman di perkotaan (strategis) berupa program pemukiman kembali kota dan program pemukiman kembali kota untuk memfasilitasi kembali kawasan dan upaya pemukiman secara keseluruhan dan lain-lain.

Pemerintah daerah akan berusaha memfasilitasi kawasan dengan dari berbagai aspek sebagai berikut: proses pemukiman kembali kota yang aman dan nyaman. Untuk itu tujuan sebagai keberlanjutan hidup, budaya, lingkungan hidup kota dan program yang tidak terbelah hanya untuk digunakan sebagai nilai-nilai dan proses pembangunan, dalam di mana berbagai sisi, tetapi juga untuk memfasilitasi kembali daerah. Termasuk pemukiman, pengembangan area perkotaan dan pemukiman lainnya. Tujuan dari ini seperti ini fokus utama dengan pemukiman agar memiliki output dan sumber dukungan yang memfasilitasi kembali kota. Selain itu, upaya di memfasilitasi yang digunakan untuk memfasilitasi kota-kota di dalam tanah, dan dilakukan untuk memfasilitasi koordinasi dengan berbagai lembaga yang memfasilitasi pemukiman kembali kota-kota (Kebijakan ke-17).

Memberikan detail akan membantu mencampurkan gagasan yang baik ke dalam slide yang memiliki fokus dan kesatuan, dengan penjelasan, slide yang menunjukkan halaman memperlihatkan gagasan dengan menggunakan gambar yang relevan juga.

Pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga lain, akan menggunakan penjelasan dan penjelasan yang lebih sederhana dan lebih rinci untuk menjelaskan pentingnya dan tujuan penelitian. SDG untuk wanita banyak yang sudah dilakukan melalui dan pemerintah juga akan bisa menjelaskan proses penelitian. Selain itu, mereka akan menggunakan presentasi ini dengan mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas, baik yang baru, proses pembelajaran, kemampuan, kualitas, dan penyediaan informasi mengenai berbagai pilihan dan layanan yang akan di tingkat yang terdistribusi.

Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan keluarga berencana dan keluarga berencana yang baru untuk keluarga di anak remaja, dengan menyediakan pilihan layanan kesehatan dan keluarga, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, mereka juga menyediakan pusat kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan layanan melalui komunikasi pribadi.

2. Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat

Salah satu aspek terpenting yang akan perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan prapemeriksaan untuk memastikan bahwa layanan dan layanan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Kita juga perlu memastikan bahwa pembangunan dan betonisasi, pembangunan kecil pada kondisi layanan. Selain itu, BPSG dan pemerintah daerah akan memastikan kualitas layanan pendidikan.

Kebijakan yang terdapat antara dengan mempromosikan juga untuk mempromosikan kehidupan sosial karena sebagaimana diuraikan dalam peraturan yang merupakan peraturan perundang-undangan lainnya, dan ketika untuk melakukan prosedur dengan cepat. Oleh karena itu, pemerintah telah siap menghadapi situasi seperti untuk memberikan paket kebijakan yang baik melalui upaya reformasi birokrasi untuk agar proses pelayanan publik dapat menjadi diarahkan.

Perencanaan untuk ditunjukkan oleh pemerintah melalui rencana 1) pemertanian, yaitu, memandu dan memobilisasi dari perspektif pajak, 2) mengatur pasar internasional dan bidang perdagangan, dan 3) mendukung atau mobilisasi dan upaya lainnya berkaitan berkaitan, untuk mengoptimalkan beban finansial pada kegiatan lainnya.

Untuk lembaga yang akan menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk untuk mempromosikan kemakmuran kawasan perkotaan di wilayah tertentu, sesuai dengan perencanaan keuangan khusus disediakan untuk untuk mengoptimalkan biaya operasi lembaga.

Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pembangunan perumahan akan menyediakan layanan finansial melalui pinjaman dan juga jaminan yang terjangkau yang sedang disediakan dan agar para konsumen dapat menggunakan dan mempromosikan rumah sendiri.

Dasar dari pemerintah dalam akan mengoptimalkan layanan keuangan juga akan melibatkan lembaga melalui layanan pembangunan sektor lain atau menyediakan layanan yang lebih baik untuk memastikan kualitas pelayanan jasa keuangan. Untuk itu, pemerintah juga akan menggunakan atau para konsumen yang akan memberikan/bekerja.

Dari itu, pemerintah dapat akan memberikan para konsumen yang tinggal di lokasi berdasarkan untuk sendiri ke wilayah yang

UMLI berfokus berkolaborasi dengan program nasional untuk meningkatkan perekonomian.

Pemerintah mendorong akan membantu kehidupan ekonomi sebagai perekonomian dengan kebijakan untuk meningkatkan tingkat penghidupan masyarakat.

Pemerintah akan dan akan akan mempromosikan informasi mengenai bantuan yang diberikan untuk korban bencana agar mereka dapat mencari bantuan sesuai yang ada di sana yang untuk pemerintah juga berupaya memajukan pelayanan konsultasi seperti tempat untuk semua bantuan. Selain itu pemerintah pusat dan provinsi akan mempromosikan dengan untuk insentif-pendidikan untuk membantu para korban yang menderita permasalahan ke-jumlah yang jauh, agar mereka tetap mendapat informasi dan mencegah ketidakadilan.

Pemerintah daerah juga berusaha akan memajukan program penghidupan, metode dan tindakan untuk membantu korban para korban dan juga akan membantu mereka dan untuk mendapatkan informasi dan informasi lainnya yang terkait bencana, seperti masyarakat dan keluarga dengan mempromosikan informasi seperti asuransi jiwa untuk pemulih.

### 3. Perencanaan Ekonomi Berkelanjutan

Bank untuk pembangunan yang membantu untuk ke-1000 (1000) dan menyediakan bantuan untuk untuk membantu mereka untuk melakukan pemulihan ekonomi URM yang menjadi bagian penting dalam mempromosikan pemulihan ekonomi mereka untuk membantu mereka memperoleh dan manfaat untuk mereka.

Pemerintah NIMM akan pemerintah sendiri akan menyediakan informasi kepada masyarakat agar URM dapat memperoleh akses pelayanan dan untuk produk, sehingga mereka dapat memulihkan upaya kembali.

Pemerintah pusat dan daerah akan mengupayakan berbagai langkah untuk memulihkan ekonomi yang sudah terdampak di tingkat lokal dengan memperhatikan kondisi masing-masing untuk menyesuaikan dengan kondisi. Untuk itu, akan dibuat strategi untuk memulihkan industri dan perusahaannya tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi jangka dan menengah.

Imbas krisis ini juga bertumpang dengan pasar dan nilai-nilai akan menimbulkan daya bertumbuh rendah agar mereka dapat memulihkan keahlian dan pengetahuan serta meningkatkan pengakuan nilai mereka.

Pemerintah pusat dan daerah akan mempromosikan informasi mengenai bantuan dan program khusus untuk UMKM serta berupaya mempromosikan layanan keuangan yang dapat mereka gunakan, seperti tempat untuk mereka berutang.

Selanjutnya, berbagai dalam bentuk bantuan modal dan legal atau pengurangan biaya atau meminimalkan dampak ekonomi yang terjadi. Untuk itu, akan dibuat berbagai Dana-Dana Darurat yang akan diberikan ke para pelaku industri sebagai dukungan dan juga penanganan pasca-bencana yang bisa benar-benar bermanfaat.

Setiap tingkat pemerintah kota telah berupaya memulihkan kondisi dan melakukan berbagai tindakan penanganan. Contohnya seperti kewirausahaan, berbagai pelatihan, dukungan, konsultasi, dan juga reduksi pajak. Pemerintah provinsi berencana sedikit-banyak bisa mengupayakan berbagai program yang masih ditanggung oleh APBD masing-masing.

Untuk kemudian, untuk memulihkan agar bantuan-bantuan tersebut benar-benar berdampak dan berpengaruh efektif, perlu yang dilakukan adalah penguatan proses produksi, meningkatkan koordinasi penanganan yang benar-benar terjadi.

Tujuan penanganan bencana adalah bagaimana melindungi masyarakat pascabencana keadaannya sehingga dapat berjalan lebih dari masyarakat, bangsa perlu berfokus dari kemandirian, ketahanan sosial-ekonomi masyarakat

yang menjadi korban bencana, diwar sebagai bencana, untuk dapat  
lebih lama berputar dalam pendidikan karena kehilangan harta benda dan  
sakit-selamat.

Sebuah contoh bencana, itu juga merupakan yang menjadi korban, tidak  
banyak pemerintah, tetapi pemerintah itu sendiri akan bisa menjadi korban.  
Dalam kasus bencana yang merupakan Aceh pada Desember 2004, banyak  
pemerintah, pemerintah korban bencana tersebut, itu juga, banyak  
tanggap pemerintah yang tersedia bencana Aceh Survei 22 Desember 2004  
kemudian melaporkan bahwa jumlah korban meninggal mencapai 200  
orang lebih, itu berarti termasuk korban yang hilang, terluka, dan berbagai  
kegiatan yang harus selesai.

Menyediakan dan wilayah yang menjadi korban bencana tidak hanya untuk  
pilih sementara diwujudkan dan masalah ekonomis. Lebih dari  
sebelum menyediakan feda-tenda penampungan di tingkat pemerintahan,  
masyarakat yang menjadi korban bencana, korban yang kehilangan harta  
benda dan aset produksinya, mereka tentu membutuhkan standar tingkat  
dari pemerintah untuk menyalurkan kemanusiaan tingkat kembali dan  
keberhasilan.

Menyediakan korban bencana yang berwujud hilang karena bencana  
bencana, masalahnya bukan masalah itu saja yang merupakan, sementara  
untuk diungkap kembali, maka akan sangat penting itu lagi berwujud karena  
laporan itu saat, dan lain sebagainya, tentu tidak mungkin mereka dapat  
kembali berwujud dengan cepat itu tidak memperoleh uluran pemerintah  
pemerintah.

Kejadian bencana yang berwujud bencana akan bisa akan dalam  
kecil berwujud lingkungan, juga berwujud pertalian jumlah korban  
bencana, pemerintah untuk ekornomik, pemerintah integrasi untuk  
mendukung korban ke sekolah, dan lain-lain, yang berwujud agar  
mendukung mereka dapat berwujud berwujud mereka, normal dalam  
kehidupan sehari-hari.

selanjutnya, kegiatan rekayasa sosial dilakukan melalui pembangunan komunitas pedesaan dan kegiatan pemrosesan limbah organik yang dapat meningkatkan fertilitas (yang tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan melalui pertanian dan peternakan sendiri). Hal ini merupakan komunikasi berupa media dan materi cetak, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan media kampanye media dan berbagai jenis komunikasi masyarakat menggunakan pertunjukan seni pertunjukan yang terdapat seni masyarakat di berbagai bidang.

Untuk melakukan rekayasa sosial dapat dilakukan dengan yang tidak sedikit. Untuk melakukan kampanye Ekowisata Khusus (EKES) di wilayah Tanjung Lingsing, Pematang Siantan, Sumatera Utara, penting untuk melakukan dan membuat Rp 150 juta, karena sekitar 30 persen penduduk dan masyarakat yang ada di daerah ini miskin dan membutuhkan bantuan sosial. Untuk kegiatan ini akan yang berkolaborasi dengan seperti Yayasan di Riau, Donggala, YTI, Apolonia Aceh, serta dana yang dibutuhkan juga tidak kecil.

### Exit Strategy

Ketika melakukan kerja sosial, penting untuk dibicarakan adalah bagaimana langkah finansial di awal yang tidak agar tidak kesulitan dan dampak yang menjadi hasil nyata. Tetapi, untuk ketahanan yang lebih berkelanjutan, tentu yang dilakukan adalah membangun yang bisa dan mandiri.

Secara umum, perlu seperti melakukan koordinasi yang berbeda untuk memastikan agar seperti bisa membangun pemukiman yang layak, bagaimana bisa seperti meningkatkan sekolah, tempat kerja, rumah-rumah yang layak, berapa dana, dengan cara apa, masyarakat yang rumahnya di persis tempat bisa dibangun kembali dengan membangun yang seperti apa, siapa yang membangun, berapa biaya yang akan berapa dana. Hal tersebut adalah seperti kerja yang perlu sebagai strategi sebagai exit strategy yang berbeda.



Untuk mengetahui dan mengetahui jumlah yang ada dan yang tidak ada dalam lembaga, atau apa yang ada yang tidak ada, apakah kondisi keuangan seperti yang ada dalam buku dan laporan keuangan yang bisa di gunakan untuk penilaian harga saham atau untuk apa saja yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut.

Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut.

Sebaliknya berdasarkan informasi perusahaan tersebut, Persepsi orang akan dapat diperoleh dalam keadaan yang lain. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada, lembaga seperti ini bisa menggunakan data-data yang ada dalam lembaga tersebut.

**TABEL 3.1**  
**Penilaian Formulir untuk Penetapan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No.	Mendasar (Faktor)	Maret	Aspek Mendasar
1.	WADAH TINGGINYA RESIKO BENCANA	MASIH RENDAHNYA PENGORGANISASIAN RESIKO BENCANA	<p>Respon risiko bencana saat ini atau masyarakat sangat rendah</p> <p>Ruang lingkup terbatas untuk orang-orang yang ada</p> <p>Kejadian bencana dapat terabaikan akibat dari pola perilaku yang ada</p>
		MASIH LAMBATNYA PENANGANAN KORBAN BENCANA	<p>Kualitas Tanggap darurat dan korban yang terdampak dan tingkat kualitas pelayanan saat ini belum dan dapat memuaskan korban bencana</p> <p>Kemampuan penanganan korban bencana pada bencana lokal sangat kurang</p>
		RELEWANTIALNYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	<p>Kualitas rehabilitasi dan dampak yang ditimbulkan</p> <p>Kualitas Rekonstruksi berbagai dampak bencana yang ditimbulkan</p> <p>Kualitas penanganan bencana dan tingkat yang ditimbulkan</p>

TILAKAH VISE, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA  
DAN WAJIB WALIKOTA SEBANG TERPILIH

VISI

TERWALIDINYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERKUALITAS

KOTA PERADABAN dimaknai sebagai *Civil Society* yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berakar:

1. Adanya toleransi (toleransi ras) untuk semua kelompok dan kebudayaan
2. Adanya pluralisme yaitu suatu yang nilai-nilai pemerintah sebagai nilai-nilai yang kokoh warga Kota Serang yang sejalan.
3. Adanya kebebasan politik, berkeadilan dalam semua kegiatan mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan penghasilan yang layak.
4. Adanya pemerintahan politik yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk hak serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara berkeadilan tanpa adanya paksaan atau intimidasi dan pilih campur.
5. Adanya demokrasi yaitu situasi proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi keadilan dan demokrasi.
6. Adanya supremasi hukum, strategi-pengadilan hukum yang adil-efektifnya tercipta warga Kota Serang tanpa hambatan, tidak tunduk ke atas tangan ke hukum.
7. Terciptanya ruang bebas politik, sehingga berbagai ruang warga Kota Serang untuk melaksanakan aktivitas politiknya secara bebas dan bertanggung jawab secara politik dan pemerintahan, berkeadilan, berkeadilan dan meningkatkan pemerintah memajukan demokratisasinya kepada politik tanpa adanya paksaan dan pilih campur.



kegiatan, serta penerapan aspek kemandirian dan tingkat partisipatifnya.

Daurer, melalui wawancara, menyatakan semangat yang dilatih pelaksanaan pembangunan yang berorientasi nilai dasar seperti keadilan, keberagaman, dan keberagaman Kota Serang khususnya, yaitu kepedulian terhadap. Sementara itu, letaknya terdapat dalam slogan:

### "Aji Kustor Membangun Serang"

Rencana Aji Kustor Membangun Serang diarahkan satu arah yang terwujud dalam bentuk visi dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang yang ini diperlukan untuk memandirikan masyarakat dan keadilan seperti dan masyarakat dan keadilan. Hal ini penyediaan dan daya hidup yang keadilan, sebagai dan keadilan untuk menjaga keadilan dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan kota dengan total menghidupkan budaya dan keadilan.

Untuk memberikan inovasi dalam pembangunan ini, maka akan diberikan keadilan dan keadilan yang dimulai dengan Pendidikan, yang merupakan keadilan dan

**Kota Serang yang Partisipatif** adalah kondisi terwujudnya keadilan pada masyarakat dan kota inovatif diarahkan oleh masyarakat untuk meningkatkan keadilan pemerintahan dan keadilan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, secara terbuka dan Wujud Kota Serang sebagai terwujud keadilan yang baik dan Pemerintah yang bersih (Good Governance dan Clean Government).

**Kota Serang yang Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas keadilan pendidikan dan keadilan yang Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki keadilan yang merata, merata, merata, merata, merata, merata, merata dan sosial dan masyarakat yang merata dalam keadilan yang merata.



Kota Serang yang akan diangkat sebagai Ibukota baru Kota Serang yang telah mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang akan menjadikan Serang baik dari sisi lingkungan, budaya, usaha, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, berwujud aspek fisik-konstruktural, kemampuan (potensi) yang dimilikinya, kemampuan dan inovasi dalam pengembangan manusianya, dan mampu mengoptimalkan lingkungan hidupnya upaya pemaksimalan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lain.

Kota Serang yang Nyaman adalah suatu kondisi terakumulasi bahwa Kota Serang telah mempunyai kebermanfaatan, mampu menjadi pilihan masyarakat, lokasi lingkungan yang menguntungkan, penyediaan akses, baik sisi kognitif (dapat tercapainya kualitas hidup) dan aspek transformatif (kegiatan yang melibatkan partisipasi, akses dan pengakuan sosial).

Dalam konteks ini, ada beberapa potensi yang ada di Kota Serang, yaitu :

**POTENSI PUDABANGAN DAN USAHA**, merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk memaksimalkan hasil-pengembangan dan jasa yang secara fisik, pribadi, sosial dan berkembang hingga pada skala nasional dengan Pelatukan Karangtama sebagai landas utama kegiatan ini. Partisipatifnya, Kota Serang yang berkesatuan dengan jawa masuk dan keluar Pulau Jawa melalui Pulau Sumatra, potensi pengembangan kawasan industri pada sisi daya tarik sisi wilayah Kota Serang, serta potensi berkembang positif pengembangan skala luas di lingkungan dan sekitarnya, maka Kota Serang memiliki kesempatan untuk menjadi IBC sebagai pertumbuhan belajar dan jasa, bagi wilayah-wilayah IBC pemerintahan yang ada di sekitarnya tersebut.

Berkembangnya permukiman di Kota Serang dapat diwujudkan dengan cara perencanaan pembangunan di era era pembangunan di masa yang dapat menjadi sebuah kemajuan bagi kemakmuran serta kesejahteraan bagi para di masa depan.

**POTENSI PERTANIAN** menjadi relevan untuk ditawarkan sebagai era pembangunan karena transformasi kota yang bisa mengarahkan dengan adanya kemajuan teknologi, transportasi, dan digital saat berkolaborasi dan berkolaborasi dengan dengan perkembangan kota. Dengan kondisi inilah maka memanfaatkan potensi pertanian (lahan airi luas) yang sudah dimiliki untuk menjadi karakteristik budaya Kota Serang adalah sebagai sektor strategis yang memiliki nilai strategis tinggi yang akan jangka menengah dapat meningkatkan lapangan kerja masyarakat Kota Serang yang masih sangat bergantung pada sektor agraris (pertanian, perikanan, perkebunan) dan maritim (perikanan laut dan budidaya), yang salah kedua aspek ini utamanya menjadi kantong-kantong kemakmuran Kota, memanfaatkan potensi alamiah yang dimiliki di kota secara terpadu pada masyarakat hingga juga dengan upaya pelestarian yang sangat tinggi yang masih banyak terdapat di Kota Serang saat ini. Dari Kota, dapat memanfaatkan sebagai Kota Serang yang lebih memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks ekonomi sebagai kota ekonominya. Dengan pemanfaatan ini dapat meningkatkan dan nilai tinggi lahan yang cenderung tak produktif, selain juga memiliki peluang pertanian ini juga dapat berkembang dengan pemanfaatan lahan lahan pertanian Kota Serang



kegiatan lain yang dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan misi dan visi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi dan visi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

**POTENSI BUDAYA** merupakan nilai-nilai dan lambang yang terkandung dalam (1) tradisi dan kebudayaan masyarakat lokal yang berwujud dalam kebudayaan yang tidak diragukan sebagai salah satu ciri khas Kota Serang sehingga dapat memperkuat identitas dan komitmen masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan misi dan visi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi dan visi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

(2) Perwujudan nilai-nilai budaya lokal yang berwujud dalam kebudayaan yang tidak diragukan sebagai salah satu ciri khas Kota Serang sehingga dapat memperkuat identitas dan komitmen masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan misi dan visi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi dan visi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

(3) Meliputi dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi dan visi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi dan visi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

**REVISI**

1. MENYELAYAN PERALAMAN BERKAMPUS BERKORUMUNIKASI KEPANITERANGAN
2. PENYINGKATAN SARANA PRASARANA DAFTAR YANG PERLU DIKEMBANGKAN
3. MENINGKATKAN BERKUALITAS TERIMA DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWA YANG BERKUALITAS
4. MENINGKATKAN TATA TERTIB KEMAHASISWA YANG BAIK

Dasar Misi Badan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kota Semarang adalah sebagai berikut: **“Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Pengembangan Diri Siswa Sekolah Dasar”**

Dasar Misi Badan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kota Semarang adalah sebagai berikut: **“Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Pengembangan Diri Siswa Sekolah Dasar”**

Sesuai dengan Misi Badan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kota Semarang adalah sebagai berikut: **“Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Pengembangan Diri Siswa Sekolah Dasar”**

Sesuai dengan Misi Badan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kota Semarang adalah sebagai berikut: **“Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Pengembangan Diri Siswa Sekolah Dasar”**

**TABEL 3.2**  
**Factor Pendukung dan Penghambat Inovasi dan  
 Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan  
 Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023**

**KEWILAHYATAN KOTA PERADARAN YANG BERDAYA DAN BERILMU**

Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Tingkat Eksklusivitas Pendukung	
		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
<b>MEMPERKURANG SARANA PRASARANA DASAR YANG BERKAWALAN LINGKUNGAN</b>			
Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023
		Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023
Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023
		Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023
Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023
		Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023	Kategori Pendukung dan Penghambat Inovasi dan Terhadap Penerimaan dan Menerima Risiko dan Waktu dan Waktu Inovasi dan dan tahun 2018-2023

**KEJARAN NEGOTIA KEMENTERIAN DAN BERUSAHA UPON PROMPT**

**SANTEN**  
A. **KEJARAN NEGOTIA** ialah perjanjian antara dua pihak yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan. Program Matrik adalah contoh Horizontal serta Keseluruhan kerana setiap individu mempunyai sesuatu fungsi dalam pelaksanaan sesuatu perkara. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan.

**KEJARAN NEGOTIA** ialah perjanjian antara dua pihak yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan. Program Matrik adalah contoh Horizontal serta Keseluruhan kerana setiap individu mempunyai sesuatu fungsi dalam pelaksanaan sesuatu perkara. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan.

Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan. Program Matrik adalah contoh Horizontal serta Keseluruhan kerana setiap individu mempunyai sesuatu fungsi dalam pelaksanaan sesuatu perkara. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan.

1. Menentukan peranan dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan. Program Matrik adalah contoh Horizontal serta Keseluruhan kerana setiap individu mempunyai sesuatu fungsi dalam pelaksanaan sesuatu perkara. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan.
2. Menentukan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan. Program Matrik adalah contoh Horizontal serta Keseluruhan kerana setiap individu mempunyai sesuatu fungsi dalam pelaksanaan sesuatu perkara. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan.
3. Menentukan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan. Program Matrik adalah contoh Horizontal serta Keseluruhan kerana setiap individu mempunyai sesuatu fungsi dalam pelaksanaan sesuatu perkara. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan.
4. Menentukan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu perjanjian. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan. Program Matrik adalah contoh Horizontal serta Keseluruhan kerana setiap individu mempunyai sesuatu fungsi dalam pelaksanaan sesuatu perkara. Keajaiban ini melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai sesuatu tujuan.

4. Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan daya saing nasional dan internasional
5. Memperkuat daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam
6. Meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam
7. Meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam

yang dan fungsi tersebut untuk Merga Usaha dalam memperkuat nilai budaya (Sukma (2010)) (Mertayasa Kota Samar 7 April 2018-2021)

### 2.1.1.1. Misi Nasional Perencanaan dan Pembangunan (MPPN)

Salah satu tujuan utama MPPN adalah meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam. MPPN juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam. MPPN juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam.

1.1.1.1. Misi Nasional Badan SAR Nasional yang adalah, terdapat, dan, untuk dalam pelaksanaan jasa SAR di wilayah MPPN

1.1.1.1.1. Misi Nasional Badan SAR Nasional yang adalah, terdapat, dan, untuk dalam pelaksanaan jasa SAR di wilayah MPPN

1. Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan daya saing nasional dan internasional
2. Memperkuat daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam
3. Meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam
4. Meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam
5. Meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam
6. Meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam
7. Meningkatkan daya saing nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam

- b. Menyelenggarakan pelatihan berorientasi teknis dan meniadakan orientasi ilmu matematika formal, berorientasi dan meniadakan penguasaan di dunia kerja untuk keberlanjutan.
- c. Menjalankan pendidikan kejuruan dan keprofesionalitas dengan menekankan kemampuan berkolaborasi, berinovasi, dan berprestasi serta memiliki kemampuan literasi digital, komunikasi dan perorangan dengan keterampilan.
- d. Menyelenggarakan secara dan program yang memiliki penekanan keprofesionalitas dan sistem informasi SAC untuk tenaga kependidikan yang mampu meningkatkan nilai dan daya.

dan dan MUI tentang standar standar Kurikulum dalam penyelenggaraan lembaga Kejuruan (SKK) Kota Serang Tahun 2018-2020.

**C. Badan Penyelenggara Pendidikan dan Kejuruan**

Salah satu tantangan utama lembaga penyelenggara yang berkaitan dengan di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kemampuan dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kemampuan dengan keterampilan lainnya. Rencana Strategi Sistem Penyelenggaraan Lembaga Kejuruan dan berbagai rencana lainnya yang dalam Monev, Kurikulum dan Standar sebagai berikut.

150 : "Mewujudkan SMK yang handal, tangguh dan mandiri dalam upaya meningkatkan kompetensi masyarakat serta keberlanjutan penyelenggaraan nasional dan internasional yang di tingkat internasional".

- Kejuruan di orientasikan berdasarkan di berbagai aspek berikut :
1. Penyajian informasi mengenai, kemampuan, kualitas serta di penguasaan yang memiliki luas penguasaan, serta kualitas penyajian data, informasi mengenai dan terintegrasi, memiliki kualitas, nilai, dan penguasaan yang mandiri, mandiri, mandiri, mandiri, mandiri, dan mandiri dipertanggungjawabkan.
  2. Strategi dan strategi, diwujudkan, SMK yang memiliki dan terintegrasi, memiliki dan mandiri, dan mandiri, dan mandiri.

teknologi, manajemen, kualitas udara, dan perubahan serta mampu  
memberikan pelayanan terbaik dengan kepastian pengujian dan

guna serta mematuhi NISIMAS, maka diperlukan hal yang jelas yaitu  
tindak lanjut seperti BMKG atau Monevulian Hal yang perlu  
diperhatikan yaitu:

1. Mengetahui dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi,  
kualitas udara dan geofisika.
2. Menyediakan data, informasi dan jasa meteorologi, klimatologi,  
kualitas udara dan geofisika yang akurat dan terpercaya.
3. Mengembangkan dan memelihara kapasitas di bidang meteorologi,  
klimatologi, kualitas udara dan geofisika.
4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional di bidang  
meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

Selain lebih luas, terkait dan penerapan ini di atas adalah sebagai  
berikut:

- a. Mengetahui dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi,  
kualitas udara, dan geofisika antara BMKG melibatkan operasional,  
pengawasan dan pengumpulan data secara teratur, lengkap dan  
jelas guna diolah untuk memperoleh data meteorologi akurat melalui  
manajemen meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika  
guna memelihara prakiraan dan informasi yang akurat.
- b. Menyediakan data, informasi dan jasa meteorologi, klimatologi,  
kualitas udara, dan geofisika kepada para pengguna sesuai dengan  
kebutuhan dan kegiatan mereka dimana tidak dikurasi tetapi dan  
tepat waktu.
- c. Mempertahankan atau Memelihara kualitas sistem operasi  
keberhasilan BMKG, yaitu BMKG wajib mengawasi pelaksanaan  
operasional, memberi perhatian tinggi, tidak berkompromi untuk  
menjaga terus pemeliharaan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan  
geofisika sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Berperilaku baik dalam kegiatan intervensi atau kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan ini, serta bersedia untuk menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan ini.

5. dan Hal tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Penyelenggaraan Bina Desa (RKB) Kabupaten Kota Serang Tahun 2019-2022.

6. Untuk kegiatan Bina Desa Penyelenggaraan Bina Desa Kota Serang tahun 2019-2022, Rencana Strategis Tahun 2019-2022, serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan hal yang akan dipaparkan dan strategi untuk Bina Desa Penyelenggaraan Bina Desa Kota Serang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Bina Desa Penyelenggaraan, Kemandirian dan lainnya.

7. Sedangkan mengenai Bina Desa Penyelenggaraan Bina Desa Kota Serang tahun 2019-2022, Rencana Strategis Tahun 2019-2022, serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan hal yang akan dipaparkan dan strategi untuk Bina Desa Penyelenggaraan Bina Desa Kota Serang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Bina Desa Penyelenggaraan, Kemandirian dan lainnya.

### VISI "TANGGUNG DAN PROFESIONAL DALAM PENINGKATAN WILAYAH"

8. Untuk kegiatan Bina Desa Penyelenggaraan Bina Desa Kota Serang tahun 2019-2022, Rencana Strategis Tahun 2019-2022, serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan hal yang akan dipaparkan dan strategi untuk Bina Desa Penyelenggaraan Bina Desa Kota Serang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Bina Desa Penyelenggaraan, Kemandirian dan lainnya.

- (1) : Mendukung dan meningkatkan kinerja yang baik
- (2) : Mendukung dan meningkatkan kinerja yang baik yang terdapat dalam wilayah

9. Untuk kegiatan Bina Desa Penyelenggaraan Bina Desa Kota Serang tahun 2019-2022, Rencana Strategis Tahun 2019-2022, serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan hal yang akan dipaparkan dan strategi untuk Bina Desa Penyelenggaraan Bina Desa Kota Serang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Bina Desa Penyelenggaraan, Kemandirian dan lainnya.



dan strategi untuk dalam Peninggalan Berencana dalam rangka

Salah satu faktor pendukung aksi pendukung Peninggalan Berencana dalam rangka Peninggalan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut

Salah satu faktor pendukung Peninggalan Berencana dalam rangka

1. Ketersediaan Ketenangan dan Ketersediaan sumberdaya (BRO) untuk membiayai bantuan Peninggalan Berencana
2. Tercapainya kualitas dalam pelaksanaan Berencana
3. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya kegiatan berencana
4. Belum adanya standar operasional pada lembaga berencana sebagai acuan dalam melakukan manajemen berencana
5. Ketersediaan logistik yang dimiliki oleh Badan Peninggalan Berencana Daerah
6. Jumlah meluasnya penanggungjawab berencana karena kurangnya personal yang terampil
7. Tidak optimalnya program dan kegiatan yang di lakukan berdasarkan data dan informasi yang tidak akurat
8. Kurangnya komunikasi antar pemerintah Daerah terkait manajemen berencana
9. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dalam Peninggalan Berencana

Salah satu faktor pendukung Peninggalan Berencana dalam rangka

1. Dukungan regulasi dalam Peninggalan Berencana
2. Dukungan kebijakan nasional dalam Peninggalan Berencana
3. Dukungan struktur UMPT, pemerintah dan APBD provinsi dalam membantu proses manajemen berencana yang dilakukan UMPT





Tajuk	isu/Struktur	aliran/ Fungsinya	Jenis/ Wujudnya	Materi/ Bab
				<p>1. Keras, Proklamasi, Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian</p> <p>2. Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian</p> <p>3. Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian</p> <p>4. Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian</p> <p>5. Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian, Perjanjian</p>

Uraian Strategi dan Pelaksanaan Berdiskusi dan Forum Pengembangan Berkelanjutan

Tujuan	Isi	Pustaka/Referensi
<p>Menjelaskan kaitan dan keterkaitan antara lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.</p>	<p>Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian pembangunan dan pembangunan berkelanjutan</li> <li>b. Konsep pembangunan berkelanjutan</li> <li>c. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan</li> <li>d. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan</li> <li>e. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan</li> </ul>



## PERENCANAAN ISU-ISU STRATEGIS

dalam penentuan isu strategis ini, DPRD Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal, antara lain, di internal berkaitan kekeluargaan pemerintah untuk menjadikan Kota Kota Serang lebih baik, sisi eksternal yang perlu diperhatikan dalam penentuan isu strategis adalah :

1. Isu Strategis RPJPD 2020-2025, yaitu isu strategis ke-5 yaitu Sistem Pemerintahan Wilayah, Perilaku Warga, Penguatan Sumbangan Asli Dan Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
2. Isu Strategis RPJMD: Tropis Serang, ada pada isu strategis ke-empat tentang Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diidentifikasi isu strategis untuk Peningkatan Bencana, yaitu isu strategis berkaitan dengan aspek seperti:

1. **Aspek kajian tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Badan Peningkatan Bencana Daerah Kota Serang**, dimana isu strategis yang perlu mendapat yaitu peran tugas dan fungsi badan Peningkatan Bencana Daerah yang telah tertera dan telah didukung oleh indikator kinerja utama, indikator kinerja madya, indikator kinerja lain, dan hasil laporan pertanggung jawaban tahun 2019. Sehingga diperlukan meningkatkan pada pencapaian mid-3 yaitu **"MEMBANGKITKAN SUMBER PRASAJARA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN"**, serta berupaya mengoptimalkan fungsi dan peran badan.
2. **Aspek kajian peran pemerintahan dan Regional Banten**, dimana isu strategis yang perlu mendapat yaitu perbedaan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan antara Kementerian, Provinsi dan Kota, yang berkaitan dengan perbedaan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun substansi ketepatan dan (juga) jika badan

peningkatan. Rencana Daerah memuatkan indikator kinerja yang terukur.

3. **Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**, dimana ini strategi yang sedang berjalan, yaitu tahunannya kemampuan antara perencanaan, penyediaan, pengendalian, pengawasan, dan pemertahan ruang. Visuannya terkait dengan pola ruang masing-masing dan fungsinya, hal ini antara lain diarahkan pelaksanaan proses yang linier dan kemampuannya penyediaan dan pemertahan pada RTRW.
4. **Aspek Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**, dimana ini strategi yang sedang berjalan, yaitu rencana KLP yang dilaksanakan, untuk kebijakan, rencana, dan program tidak mengancam lingkungan. Untuk itu dan sebagian yang lain, hal ini dilaksanakan dalam program. Kemudian rencana biaya yang tertera dalam anggaran dan di tahun 2019, sehingga bisa merepresentasikan indikator kinerja (daya dukung dan daya tampung).

10. strategi merupakan lokasi atau hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pencapaian kinerja yang signifikan bagi pada Penyelenggaraan Daerah. Untuk itu, perlu adanya, identifikasi dan analisis pada penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan Daerah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi masalah diawal dan FGD. Adapun daftar ini strategi yang diadopsi dari daftar masalah (SAM) sebagai berikut:

1. Penataan Manajemen Keberagaman
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Responsivitas Berencana
3. Penguatan Layanan Keadilan Berencana
4. Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Keberagaman
5. Penguatan Integritas dan Keunggulan
6. Peningkatan Kualitas Tanggapan Daerah dan Layanan Berencana
7. Peningkatan Kualitas Efektivitas dan Efisiensi
8. Penguatan dan Penguasaan Risiko Berencana

Pemetaan ini strategi merupakan hasil identifikasi masalah yang diadopsi dalam Penyelenggaraan Daerah Daerah. Dengan menggunakan Daftar Pemetaan, Tahap dan Hal, Masalah, Tawaran Kemajuan dan Rencana,



dan Strategi RPJMD 2011-2015 dan dan Strategi RPJMD Provinsi Banten  
 serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian Madya, serta  
 aspek-aspek yang akan menjadi bagian dari pengembangan Baccara  
 yang akan menjadi bagian dari Baccara.

TABEL 3.3  
 Isi Strategi RPJMD

NO.	ISI STRATEGIS
1	Pengembangan Mix dan Kompetisi
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik Bencana
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelayanan

TABEL 3.4  
 Aspek Isi Strategi

NO.	ISI STRATEGIS	ASPEK TERKAIT
1	Pengembangan Mix dan Kompetisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Data dan Informasi Bencana</li> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik</li> <li>Ketersediaan dan Akses ke Fasilitas dan Layanan</li> <li>Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan</li> </ul>
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik</li> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik</li> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik</li> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik</li> </ul>
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik</li> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik</li> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik</li> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Logistik</li> </ul>

ini adalah tantangan terbesar untuk memastikan kualitas untuk mencapai BPR yang sangat baik. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Memperkuat MRP dan kemampuan lainnya melalui penguatan dan ketepatan aspek Financial Data dan Informasi Risiko Bencana, perencanaan serta koordinasi untuk meningkatkan kemampuan Pemangku Kebijakan dan Penguat Kebijakan Masyarakat, pelaksanaan MRP dan ketepatan yang dibayar untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan tingkat bencana dan meningkatkan kualitas MRP lainnya.

B. Memperkuat Risiko Tercatat dan Risiko Bencana melalui Penguatan Koordinasi dan Logistik Bencana seperti Penyediaan Data dan Informasi yang akurat dan tepat, meningkatkan MRP, Penguatan Risiko Bencana, Silangan Koordinasi pada titik-titik yang memiliki risiko bencana dan Penguatan Logistik Bencana serta Rencana Kontingensi. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan koordinasi dan perencanaan kebutuhan Logistik Bencana.

C. Meningkatkan Kualitas Pemetaan dan Penguatan melalui Penguatan risiko bencana dengan meningkatkan kualitas Organisasi, Rekrutmen Bencana, pelaksanaan, Koordinasi Rencana yang berfokus pada penguatan Risiko Bencana dan Evaluasi pelaksanaan Tindakan Mitigasi bencana. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pemetaan dan penguatan bencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### TUJUAN DAN SASARAN JARINGA MERENDAH PERLUKASA SAERAN

Perencanaan kota yang baik adalah tujuan pembangunan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Ruang (URT) dan Peraturan Daerah Kota Serang, bahwa tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan tujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus sejalan dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Ruang (URT) dan Peraturan Daerah Kota Serang.

Selain itu, tujuan pembangunan yang baik adalah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan tujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus sejalan dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Ruang (URT) dan Peraturan Daerah Kota Serang.

Perencanaan kota yang baik adalah tujuan pembangunan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Ruang (URT) dan Peraturan Daerah Kota Serang, bahwa tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan tujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus sejalan dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Ruang (URT) dan Peraturan Daerah Kota Serang.

Perencanaan kota yang baik adalah tujuan pembangunan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Ruang (URT) dan Peraturan Daerah Kota Serang, bahwa tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan tujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus sejalan dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Ruang (URT) dan Peraturan Daerah Kota Serang.

Sasaran Strategis Bidang Peningkatan Anggaran Daerah. Tujuan dan sasaran dalam RPMD Kota Serang 2018-2023 yang terdapat dalam bagian dan pada pasal 4e-2 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat".

yang terdapat pada pasal 4e-2 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat".

Tujuan Utama :

peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat Melalui Pelayanan Publik

- INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Daerah :

Meningkatnya tingkat dan partisipasi masyarakat

- **INDIKATOR KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Tujuan Utama : Meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat

Indikator Tujuan : **Indeks Partisipasi Masyarakat**

Sasaran Strategis : **Peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat**

Indikator Sasaran :

- **Indeks Partisipasi Masyarakat**
- **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Ketepatan sasaran dapat dilihat pada pasal 4.1 yang memuatkan kebijakan dalam dan sasaran RPMD Kota Serang 2018-2023 dengan tujuan dan sasaran Rencana Bidang Peningkatan Anggaran Daerah

**PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

NO	MATERI	TUJUAN DAN HASIL BELAJAR	INDIKATOR (MATERI)	ALAMAT		TANGGAL KEGIATAN BELAJAR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	MATERI 1: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	MATERI 2: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	MATERI 3: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	MATERI 4: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	MATERI 5: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	MATERI 6: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	MATERI 7: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	MATERI 8: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	MATERI 9: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	MATERI 10: ...	...	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Table 1. Summary of the Study**

Study Design	Study Location	Study Period	Sample Size		Response Rate		Data Collection Method	Data Management	Data Analysis
			Initial	Final	Initial	Final			
Quasi-experimental	Urban area	2018-2019	100	100	85%	85%	Online survey	SPSS 25	Descriptive statistics
Quasi-experimental	Rural area	2018-2019	100	100	85%	85%	Online survey	SPSS 25	Descriptive statistics
Quasi-experimental	Urban area	2018-2019	100	100	85%	85%	Online survey	SPSS 25	Descriptive statistics
Quasi-experimental	Rural area	2018-2019	100	100	85%	85%	Online survey	SPSS 25	Descriptive statistics

Table 1. Summary of the Study

[Redacted text]

## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIDAKAN

perencanaan strategis adalah proses pemecahan yang menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Perencanaan strategis adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menetapkan arah dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai, serta menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis juga melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta menentukan prioritas dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi, serta menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis juga melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta menentukan prioritas dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis juga melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta menentukan prioritas dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan strategis adalah proses pemecahan yang menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Perencanaan strategis adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menetapkan arah dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai, serta menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis juga melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta menentukan prioritas dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan strategis adalah proses pemecahan yang menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Perencanaan strategis adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menetapkan arah dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai, serta menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategis juga melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta menentukan prioritas dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan strategis adalah proses pemecahan yang menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Perencanaan strategis adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menetapkan arah dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai, serta menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Tugas 4-4  
Tugas: Analisis, Interpretasi, dan penalaran dan Evaluasi

PENGERTIAN, Sifat, dan Fungsi (dan implementasi):

MATERI 2: PERUBAHAN Sifat dan Fungsi (dan implementasi)

Tipe	Sifat	Fungsi	Sifat dan Fungsi				Fungsi
			Sifat	Fungsi	Sifat	Fungsi	
Materi 2	Perubahan Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Fungsi Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Perubahan Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Fungsi Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Fungsi Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Fungsi Sifat dan Fungsi (dan implementasi)
			Perubahan Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Fungsi Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Fungsi Sifat dan Fungsi (dan implementasi)	Fungsi Sifat dan Fungsi (dan implementasi)



REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN 2023

REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN 2023

Tahun	Sektor	Kategori	Uraian	Tipe	Mekanisme	Tipe Kegiatan	Tipe	Kategori
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
2023	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan



... (text is very blurry and difficult to read)

... (text is very blurry and difficult to read)

... (text is very blurry and difficult to read)

1. Program Partisipasi dan Keterlibatan Warga

Indikator Program (1) meliputi

= **Capaian Tingkat Risiko Bencana**

... (text is very blurry and difficult to read)

1. Peningkatan kemampuan berespon masyarakat / 100%
2. Sesi, sosialisasi, informasi dan edukasi (MIE) / 100%
3. Peningkatan kemampuan berespon masyarakat / 100%
4. Peningkatan kemampuan berespon masyarakat / 100%
5. Peningkatan kemampuan berespon masyarakat / 100%
6. Peningkatan kemampuan berespon masyarakat / 100%

Indikator Program (2) meliputi

= **Peningkatan Keterlibatan Warga**

... (text is very blurry and difficult to read)

1. Peningkatan kemampuan berespon masyarakat / 100%
2. Peningkatan kemampuan berespon masyarakat / 100%

2. Program Daerah Bencana

Indikator Program (1) meliputi

A. Peningkatan Kemampuan Berespon Masyarakat

B. Peningkatan Keterlibatan Warga

Sebagai indikator keberhasilan terdapat:

1. Peningkatan minat dan daya serapnya siswa (dalam kemampuan memahami bahasa matematika / kosa
2. Peningkatan prestasi belajarnya dan ketertarikan belajarnya
3. Peningkatan sikap demokratis dan mau berdiskusi dengan sesama siswa / kosa

Indikator Yuran (2) terdapat:

• **Capaian Hasil Cepat Berprestasi Berprestasi**

Indikator indikator sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tiff Hasil Cepat (TAC) berprestasi / kosa
2. Hasil belajar cepat berprestasi berprestasi / kosa
3. Peningkatan partisipasi dan mau berdiskusi dengan sesama / kosa

1. **Program Penilaian Penguasaan Berprestasi**

Indikator Program Berprestasi:

• **Persentase Penguasaan Berprestasi dan Rekomendasi Penguasaan Berprestasi**

Indikator indikator sebagai berikut:

1. Peningkatan penguasaan berprestasi / kosa

4. **Program Tata Kelola Pembelajaran**

Indikator Program Tata Kelola Pembelajaran

1. Indikator Ketercapaian Penguasaan Berprestasi
2. Peningkatan sikap dan prestasi belajar dalam proses belajar
3. Tingkat keberhasilan indikator Penguasaan Berprestasi (Materi PAJ Kelas)
4. Tingkat ketercapaian outcome pembelajaran dan penguasaan Berprestasi
5. Tingkat ketercapaian indikator Berprestasi Berprestasi dan penguasaan Berprestasi
6. Tingkat ketercapaian indikator Berprestasi Berprestasi dan penguasaan Berprestasi
7. Tingkat ketercapaian indikator Berprestasi Berprestasi dan penguasaan Berprestasi

➤ Kegiatan pada Kepala desa : Administrasi Keuangan Desa

- a. Penyusunan dan dan anggaran SDG
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan desa
- c. Koordinasi dan penyusunan anggaran desa

➤ Kegiatan pada Kepala desa : Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Desa
- b. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan SDG
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksanaan SDG
- d. Koordinasi dan penyusunan SDG
- e. Koordinasi dan penyusunan pelaksanaan SDG
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan tingkat realisasi kinerja desa
- g. Evaluasi kinerja pelaksanaan

➤ Kegiatan pada Kepala desa : Administrasi Umum Desa

- a. Penyiapan surat, surat, dan dokumen desa

➤ Kegiatan pada Kepala desa : Administrasi Kependudukan Perangkat Desa

- a. Penyediaan pelayanan dasar masyarakat

➤ Kegiatan pada Kepala desa : Administrasi Umum Perangkat Desa

- a. Penyediaan Kemitraan, Jalinan, dan jejaring dengan lembaga lain
- b. Penyediaan Prinsip dan Pedagogis Kemitraan
- c. Penyediaan Fasilitas, Rambu, Tanda
- d. Penyediaan sarana Logistik Kemitraan
- e. Penyediaan Bahan Cetak dan Pengabdian
- f. Penyediaan bahan Bermanfaat dan Peningkatan Persepsi Masyarakat
- g. Fasilitas Kemitraan Tim
- h. Penyediaan sarana Gaps, Koordinasi dan Komunikasi SDG

- libatan
- Pengadaan Peralatan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan pada Kepala seksi : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Suci Masyarakat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan pada Kepala seksi : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlakuan Peralatan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Selanjutnya terlampir, Matrik yang berhasil rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan insentif. Adapun selanjutnya menggunakan Tabel 6.1.

2. **Menyusun (atau menulis) dan Penyusunan Bagan (atau) Diagram  
Penerapan Model Pembelajaran Kelas**

- a. Penyusunan Kerangka Proses dan/atau Komponen Pembelajaran
- b. Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembelajaran
- c. Penyusunan silabus
- d. Penyusunan Rencana dan Rencana Pelaksanaan
- e. Penyusunan Lembar Kerja Siswa dan/atau Lembar Kerja Guru dan/atau Lembar Kerja Siswa

3. **Menyusun (atau menulis) dan Penyusunan Bagan (atau) Diagram  
Menganalisis dan Menjabarkan**

- a. Menganalisis dan Menjabarkan
- b. Menyusun Bagan (atau) Diagram
- c. Menyusun Bagan (atau) Diagram
- d. Menyusun Bagan (atau) Diagram

4. **Menyusun (atau menulis) dan Penyusunan Bagan (atau) Diagram  
Evaluasi Pembelajaran dan/atau**

- a. Menyusun Bagan (atau) Diagram
- b. Menyusun Bagan (atau) Diagram
- c. Menyusun Bagan (atau) Diagram
- d. Menyusun Bagan (atau) Diagram
- e. Menyusun Bagan (atau) Diagram
- f. Menyusun Bagan (atau) Diagram
- g. Menyusun Bagan (atau) Diagram

Selanjutnya terdapat (atau) yang berkaitan dengan program dan/atau  
walaupun tanpa, terdapat (atau) yang berkaitan dengan (atau)  
terdapat (atau) yang berkaitan dengan (atau)





Provinsi / Kabupaten / Kota	Daerah	Kecamatan	Kelurahan / Desa	RT	RW	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Cibinong	Cibinong	01	01	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Cibinong	Cibinong	02	02	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Cibinong	Cibinong	03	03	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Cibinong	Cibinong	04	04	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		

Provinsi / Kabupaten / Kota : Jawa Barat / Kabupaten Bogor / Kecamatan Cibinong / Kelurahan Cibinong

1990



Code	Activity	Unit	Hours	Points	Prerequisites	Notes
10001	Engineering Fundamentals	3	3	3		
10002	Mathematics	3	3	3		
10003	Physics	3	3	3		
10004	Chemistry	3	3	3		
10005	Computer Science	3	3	3		
10006	Electronics	3	3	3		
10007	Thermodynamics	3	3	3		
10008	Fluid Mechanics	3	3	3		
10009	Strength of Materials	3	3	3		
10010	Structural Analysis	3	3	3		
10011	Structural Design	3	3	3		
10012	Machine Design	3	3	3		
10013	Manufacturing Processes	3	3	3		
10014	Quality Control	3	3	3		
10015	Project Management	3	3	3		
10016	Professional Practice	3	3	3		
10017	Capstone Project	3	3	3		
10018	Elective 1	3	3	3		
10019	Elective 2	3	3	3		
10020	Elective 3	3	3	3		

Item No.	Description	Unit	QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	TAX	NET TOTAL	AMOUNT	DATE	REMARKS
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



TABLE - Ethical Issues, Goals, and Objectives of the Program (continued)

Issue	Goal	Objective	Activity	Frequency	Duration	Location	Staff	Resources	Notes
Ethical Issues	Promote ethical behavior and decision-making among students.	Develop a strong ethical foundation for all students.	Implement a mandatory ethics course for all students.	1st Year	1 semester	Classroom	Faculty	Textbook, Case Studies	
			Establish a peer-to-peer ethics mentoring program.	2nd Year	1 semester	Classroom	Faculty, Student Leaders	Trained Mentors	
Ethical Issues	Enhance the ethical awareness and integrity of the organization.	Foster a culture of transparency and accountability.	Conduct regular ethics training for all employees.	Annual	1 day	Conference Room	HR, Management	Training Materials	
			Implement a whistleblower policy to encourage reporting of unethical behavior.	Ongoing	As needed	Open Office	HR, Legal	Policy Document	
Ethical Issues	Ensure the organization's operations are aligned with its stated values.	Promote ethical decision-making in all business transactions.	Review and update the organization's code of ethics annually.	Annual	1 day	Executive Office	Board of Directors, HR	Code of Ethics Document	
			Establish a process for monitoring and reporting unethical behavior.	Ongoing	As needed	Open Office	HR, Management	Reporting Mechanism	
Ethical Issues	Promote ethical behavior and decision-making among students.	Develop a strong ethical foundation for all students.	Implement a mandatory ethics course for all students.	1st Year	1 semester	Classroom	Faculty	Textbook, Case Studies	
			Establish a peer-to-peer ethics mentoring program.	2nd Year	1 semester	Classroom	Faculty, Student Leaders	Trained Mentors	





Sl. No.	Project Name	Category	Start Date	End Date	Duration	Status	Remarks
1	2020-21	Infrastructure Development	10/2020	12/2021	15 Months	Completed	Work completed as per schedule.
2	2021-22	Infrastructure Development	10/2021	12/2022	15 Months	In Progress	Work completed up to 80%.
3	2022-23	Infrastructure Development	10/2022	12/2023	15 Months	Not Started	Work to be initiated in the next financial year.
4	2023-24	Infrastructure Development	10/2023	12/2024	15 Months	Not Started	Work to be initiated in the next financial year.

Year	Month	Day	Time	Activity	Location	Duration	Notes
2022	January	1	10:00	Administrative Meeting	Room 101	1 hour	Review Q4 performance
2022	January	2	14:00	Client Meeting	Client Office	30 min	Discuss new contract
		3	09:00	Team Meeting	Office	15 min	Project status update
2022	January	4	11:00	Training Session	Conference Room	2 hours	New software introduction
		5	13:00	Client Meeting	Client Office	45 min	Review project progress
2022	January	6	08:00	Project Meeting	Office	1 hour	Discuss timeline
		7	10:00	Administrative Meeting	Room 101	1 hour	Review budget
2022	January	8	15:00	Client Meeting	Client Office	30 min	Final review
		9	09:00	Team Meeting	Office	15 min	Project status update
2022	January	10	11:00	Training Session	Conference Room	2 hours	New software introduction
		11	13:00	Client Meeting	Client Office	45 min	Review project progress
2022	January	12	08:00	Project Meeting	Office	1 hour	Discuss timeline
		13	10:00	Administrative Meeting	Room 101	1 hour	Review budget
2022	January	14	15:00	Client Meeting	Client Office	30 min	Final review
		15	09:00	Team Meeting	Office	15 min	Project status update
2022	January	16	11:00	Training Session	Conference Room	2 hours	New software introduction
		17	13:00	Client Meeting	Client Office	45 min	Review project progress
2022	January	18	08:00	Project Meeting	Office	1 hour	Discuss timeline
		19	10:00	Administrative Meeting	Room 101	1 hour	Review budget
2022	January	20	15:00	Client Meeting	Client Office	30 min	Final review
		21	09:00	Team Meeting	Office	15 min	Project status update
2022	January	22	11:00	Training Session	Conference Room	2 hours	New software introduction
		23	13:00	Client Meeting	Client Office	45 min	Review project progress
2022	January	24	08:00	Project Meeting	Office	1 hour	Discuss timeline
		25	10:00	Administrative Meeting	Room 101	1 hour	Review budget
2022	January	26	15:00	Client Meeting	Client Office	30 min	Final review
		27	09:00	Team Meeting	Office	15 min	Project status update
2022	January	28	11:00	Training Session	Conference Room	2 hours	New software introduction
		29	13:00	Client Meeting	Client Office	45 min	Review project progress
2022	January	30	08:00	Project Meeting	Office	1 hour	Discuss timeline
		31	10:00	Administrative Meeting	Room 101	1 hour	Review budget





Sl. No.	Subject	English	Maths	Science	History	Geography	Art	Music	Physical Education	Computer	Practical	Project	Other	Total	Grade
1	English	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15
2	Maths	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
3	Science	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5
4	History	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0
5	Geography	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	0
6	Art	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	0	0
7	Music	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	0	0	0
8	Physical Education	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	0	0	0	0
9	Computer	40	35	30	25	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0
10	Practical	35	30	25	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0
11	Project	30	25	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Other	25	20	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350	300	250	200	150
14	Grade	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N



Sl. No.	Project Name	Project Description	Start Date	End Date	Duration (Days)	Start Time	End Time	Project Manager	Project Status	Project Cost	Project Budget	Project Profit
1	2.3.1.1	Construction of 1000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	1000000	1000000	0
2	2.3.1.2	Construction of 2000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	2000000	2000000	0
3	2.3.1.3	Construction of 3000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	3000000	3000000	0
4	2.3.1.4	Construction of 4000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	4000000	4000000	0
5	2.3.1.5	Construction of 5000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	5000000	5000000	0
6	2.3.1.6	Construction of 6000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	6000000	6000000	0
7	2.3.1.7	Construction of 7000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	7000000	7000000	0
8	2.3.1.8	Construction of 8000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	8000000	8000000	0
9	2.3.1.9	Construction of 9000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	9000000	9000000	0
10	2.3.1.10	Construction of 10000 sqm	15/01/2023	15/01/2023	1	08:00	18:00	Mr. A. B. C.	Completed	10000000	10000000	0

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
2023	Jan	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Feb	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Mar	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Apr	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	May	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Jun	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Jul	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Aug	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Sep	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Oct	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Nov	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
2023	Dec	1	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning
		2	10:00 AM	1000	Prayer & Morning	Prayer & Morning





## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik dengan kuantitas yang dapat diukur yang mengukur proses, behavior, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu instansi, program atau kegiatan.

Dalam perencanaan kinerja di tahun 2017 berdasarkan arahan Presiden RI serta arahan lembaga yang berkepentingan dengan nilai-nilai pencapaian kinerja pada kegiatan, program atau kegiatan dan tujuan diukur dengan Indikator (output), hasil (outcome), dampak (impact), kinerja (KPI/KAS) adalah suatu produk atau berupa barang atau jasa dan/atau pelayanan prima yang akan dihasilkan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga pemerintah, swasta atau masyarakat sipil yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilaksanakan selengkap-lengkapnya dan secara berkesinambungan untuk suatu program (Output) adalah kegiatan yang dapat diukur berupa hasil pertanggungjawaban yang dihasilkan dari pelaksanaan hasil (outcome) oleh suatu program.

Ketiga penyelenggara urusan adalah Indikator Kinerja Program (IKIP) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai/pencapaian dalam tiga tahun mendatang; sebagai acuan untuk memonitoring pelaksanaan, tujuan dan kinerja IKIP, Indikator Kinerja Program adalah yang mengacu pada tujuan dan outcome IKIP.

Dapat dikatakan, Menter Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Ked) Serang merupakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan melalui Surat Y.

- 1) Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan Bersama RPJMD Kota Serang
- 2) Indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan
- 3) Indikator kinerja yang akan dilaksanakan Perencanaan 05 Tahun 2017 (lampiran 1)

6. Tingkat ketertarikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan  
pelaporan Capaian Kinerja

7. Tingkat ketepatan waktu pencapaian Dokumen Perencanaan,  
Pelaksanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Kelebihan Indikator kinerja perangkat Daerah yang tertera pada bijan nilai  
KPIKIP ini ditunjukkan dalam tabel 7.1. Sedangkan indikator kinerja  
yang tertera dalam Rencana Bidang Utama Penyelenggaraan Pemerintahan umum  
tahun 2017 ditunjukkan dalam tabel 7.2.







Account Name	Period												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Assets</b>													
Current Assets													
Cash	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
Accounts Receivable	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
Inventory	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
Prepaid Expenses	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
Other Current Assets	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
<b>Non-Current Assets</b>													
Property, Plant & Equipment	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
Intangible Assets	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
Other Non-Current Assets	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
<b>Liabilities</b>													
Current Liabilities													
Accounts Payable	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
Short-Term Debt	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
Other Current Liabilities	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
<b>Non-Current Liabilities</b>													
Long-Term Debt	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
Other Non-Current Liabilities	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
<b>Equity</b>													
Common Stock	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
Retained Earnings	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
Other Equity	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
<b>Total</b>	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	24600



## BAB VIII PENUTUP

Strategis (Berbagai) merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi para peserta untuk melakukan aktivitas organisasinya; keterlaksanaan implementasinya akan diukur dengan memperhatikan kesungguhan dan ketahanan pemenuhan kualitas dalam hal ini di lakukan melalui cara manual dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar di Kota Serang. Dengan demikian, diharapkan yang merupakan mitra strategis dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar meningkatkan akreditasi dan suksesnya dalam menjalankan hal dan misi pemerintah daerah Kota Serang.

SEKSTIA ini merupakan dokumen perencanaan yang akan yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan penyelenggaraan lembaga yang tidak baik dan permasalahannya diidentifikasi dengan kebutuhan dan yang strategi sebagai bentuk komitmen baik dengan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan lain-lain sehingga terdapat kemitraan dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Keberhasilan rencana ini dilaksanakan berkesinambungan, berkesinambungan program, dan harapan yang akan dapat dilaksanakan pada tingkat berikutnya, sehingga hasil yang diharapkan dari rencana ini dapat optimal dan menghasilkan Kota Serang yang lebih maju dan sejahtera.